



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografis Dan Demografis

2.1.1 Karakteristik Kabupaten Jembrana

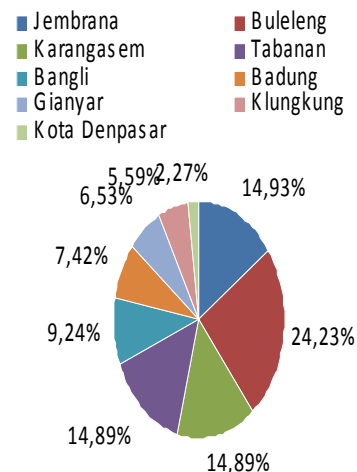
1) Luas Dan Batas Wilayah Administratif

Luas wilayah Kabupaten Jembrana secara keselfurutan adalah **841,80 Km²** atau **14,93 %** dari luas Provinsi Bali, terluas kedua setelah Kabupaten Buleleng. Dengan luasan daerah yang demikian merupakan potensi yang sangat baik khususnya di sektor pertanian maupun sektor-sektor lain seperti perkebunan, perikanan, industri maupun perdagangan.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kab/Kota se-Provinsi Bali Tahun 2014

No.	Luas Wilayah	Km2	%
1	Jembrana	841,80	14,93
2	Buleleng	1.365,88	24,23
3	Karangasem	839,54	14,89
4	Tabanan	839,33	14,89
5	Bangli	520,81	9,24
6	Badung	418,52	7,42
7	Gianyar	368,00	6,53
8	Klungkung	315,00	5,59
9	Kota Denpasar	127,78	2,27
	Provinsi Bali	5.636,66	100,00

LUAS WILAYAH PROVINSI BALI



Sumber: BPS Provinsi Bali

Batas-batas wilayah Kabupaten Jembrana adalah:

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Buleleng
- Sebelah Timur adalah Kabupaten Tabanan
- Sebelah Selatan adalah Samudra Indonesia.
- Sebelah Barat adalah Selat Bali

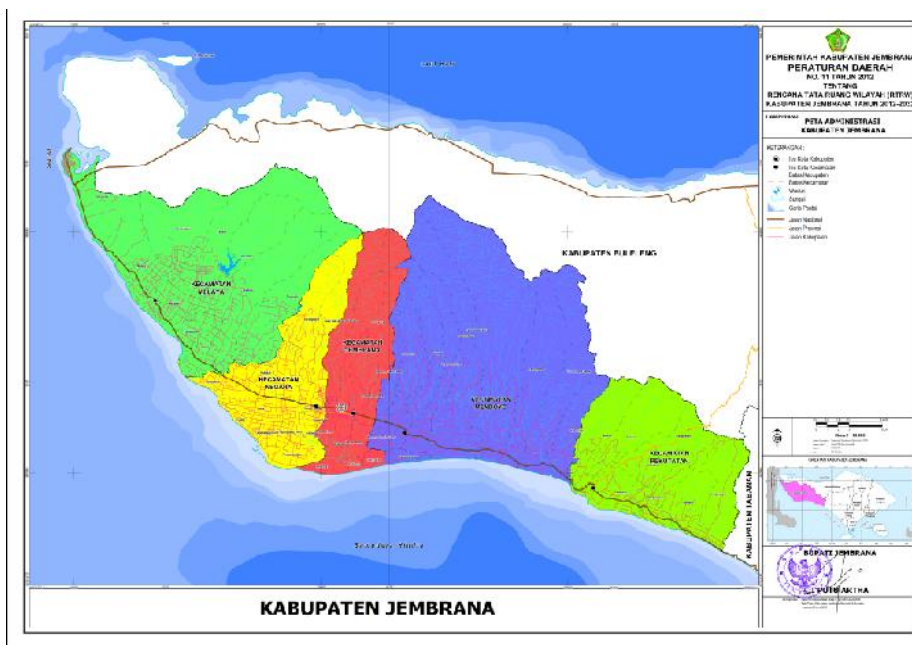
Secara administrasi Kabupaten Jembrana dibagi atas 5 (lima) wilayah kecamatan, 41 desa dan 10 kelurahan, 246 banjar dinas dan 64 desa adat. Dari 5 (lima) kecamatan yang ada di Kabupaten Jembrana, yang terluas adalah Kecamatan Mendoyo. Rincian luas masing-masing kecamatan, yaitu sebagai berikut:

- Kecamatan Melaya seluas : 197,19 km²



- b. Kecamatan Negara seluas : 126,60 km²
c. Kecamatan Jemberana : 93,97 km²
d. Kecamatan Mendoyo seluas : 294,49 km²
e. Kecamatan Pekutatan seluas : 129,65 km²

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Jemberana



Sumber : RTRW Kabupaten Jemberana 2012-2032

Tabel 2.2
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Jemberana
Tahun 2015

No.	Pembagian Wilayah Administrasi	Jumlah
1	Jumlah Kecamatan	5
2	Jumlah Desa/Kelurahan	41/10
3	Jumlah Banjar Dinas	253
4	Jumlah Desa Adat (Desa Pakraman)	64
5	Jumlah Penduduk	311.995
6	Kepadatan Per Km ²	318
7	Luas Wilayah	841,80 Km ²
8	Perbandingan Laki-Perempuan (Sex ratio)	100.48%

Sumber : BPS Kab. Jemberana



2) Letak dan Kondisi Astronomis

a. Posisi Astronomis

Kabupaten Jembrana sebagai salah satu dari 9 (sembilan) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali, secara geografis terletak di ujung barat Pulau Bali membujur dari barat ke timur tepatnya terletak pada posisi $8^{\circ} 09'30''$ - $8^{\circ} 28'02''$ Lintang Selatan dan $114^{\circ} 25' 53''$ - $114^{\circ} 56' 38''$ Bujur Timur.

b. Posisi Geostrategis

Kabupaten Jembrana merupakan pintu masuk maupun keluar pulau Bali, melalui pelabuhan Gilimanuk. Angkutan barang, wisata, penumpang umum dan jasa dari Pulau Jawa akan melewati Kabupaten Jembrana menuju ke Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Karangasem di sebelah Utara, dan angkutan menuju Kabupaten Tabanan, Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Klungkung di bagian selatan dan selanjutnya menuju penyeberangan Padang Bai dengan tujuan Provinsi NTB. Dengan demikian Jembrana merupakan jalur penghubung utama segala aktivitas antar kota-kota di pulau Jawa dengan pulau Bali, NTB dan NTT melalui jalur darat.

c. Kondisi/Kawasan

(1) Pesisir

Permukaan Bumi Kabupaten Jembrana bergelombang dan berbukit di bagian Utara, dan landai di bagian Selatan.

(2) Pegunungan

Relief dan topografi daerah Kabupaten Jembrana digambarkan dengan membentangnya pegunungan di sebelah utara yang memanjang dari barat ke timur. Namun demikian, pegunungan tersebut bukanlah gunung berapi, beberapa gunung yang terbentang di Jembrana antara lain gunung Merbuk (1.386 meter), Mesehe (1.300 meter), Gunung Klakatan (698 meter), Gunung Sanghyang (1.004 meter), Gunung Musi (1.224 meter) dan Gunung Patas (1.414 meter) serta beberapa gunung lainnya.

(3) Kepulauan

Kabupaten Jembrana juga memiliki 3 buah pulau yang tidak berpenghuni, yang terletak di Kelurahan Gilimanuk yaitu Pulau Kalong, Pulau Burung dan Pulau Lumpur.

3) Topografi

a. Kemiringan Lahan

Berdasarkan tingkat kemiringan lereng, wilayah Kabupaten Jembrana dapat di kelompokkan ke dalam 4 kelompok:

1. Wilayah dengan kemiringan lereng 0 – 2% (datar) seluas 210,47 Km^2 , tersebar diseluruh kecamatan Kabupaten Jembrana dan

- Kecamatan Negara. Kondisi tanah ini sangat potensial dimanfaatkan untuk pemukiman.
2. Wilayah dengan kemiringan lereng 2 – 15% (landai) seluas 85,49 Km², tersebar hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Jemberana. Kondisi tanah seperti ini potensial dimanfaatkan untuk berbagai jenis usaha, namun diperlukan usaha konversasi tanah dan air.
 3. Wilayah dengan kemiringan lereng 15 – 40% (bergelombang/berbukit) seluas 212,45 Km², terdapat diseluruh kecamatan di Kabupaten Jemberana. Penggunaan tanah dengan kemiringan demikian cukup rawan dan kurang baik untuk budidaya tanaman pertanian, namun perlu dikelola dengan pemilihan tanaman yang berfungsi sebagai konversasi. Secara eksisting sebagian besar kawasan pada kemiringan ini merupakan kawasan yang dikembangkan untuk hutan produksi dan hutan lindung.
 4. Wilayah dengan kemiringan lereng >40% (curam sampai sangat curam) seluas 333,39% Km², merupakan bagian terluas dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Jemberana. Kondisi kelerengan seperti ini potensial terkenal erosi sehingga perlu diupayakan pelestarian hutan lindung.

Dengan kemiringan rata-rata lahan sebagai berikut :

- Datar : 25,00 %
- wilayah landai : 10,16 %
- wilayah berbukit : 25,24 %
- wilayah curam : 39,60 %

Gambar 2.2
Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Jemberana



Sumber : RTRW Kabupaten Jemberana 2012-2032

b. Ketinggian Lahan

Topografi wilayah Kabupaten Jembrana meliputi daerah pegunungan di bagian utara dan pendataran (pantai) di bagian selatan yang berbatasan dengan Samudera Indonesia. Pada bagian tengah merupakan daerah perkotaan. Ketinggian topografi bervariasi ± 1000 mdpl (bagian utara) sampai ± 1.0 (Pantai Selatan),

Gambar 2.3
Peta Topografi Kabupaten Jembrana



Sumber : RTRW Kabupaten Jembrana 2012-2032

4) Geologi**a. Struktur dan Karakteristik**

Berdasarkan data peta geologi Kabupaten Jembrana dapat diketahui bahwa wilayah Kabupaten Jembrana terdiri dari lima jenis batuan yaitu :

- Formasi Gamping Agung
- Batuan Gunung Api Jembrana
- Formasi Palasari
- Formasi Alluvium
- Alluvium Formasi Sorga

Berdasarkan peta jenis tanah Provinsi Bali wilayah Kabupaten Jembrana terdiri dari beberapa jenis tanah yaitu :

a) Tanah Latosol Coklat dan Litosol (Inceptisol)

Jenis tanah ini tersebar di empat wilayah Kabupaten Jembrana, yang paling luas terdapat di Kecamatan Mendoyo (25.985 ha), di Kecamatan Melaya (16.319 ha), Kecamatan Negara dan Jembrana (14.130 ha) dan Kecamatan Pekutatan (12.169 ha). Jenis tanah ini dibentuk oleh bahan induk abu vulkanik intermediet dengan kandungan bahan organik yang rendah sampai sedang dan PH berkisar antara 4,5-5,5.

b) Tanah Alluvial Coklat Kelabu

Tanah ini merupakan tanah endapan sungai dengan luas kurang lebih 10.750 Ha sebagian besar terdapat di Kecamatan Negara dan Kecamatan Jember (5.725 ha).

c) Tanah Alluvial Coklat Kelabu

Jenis tanah ini di bentuk oleh bahan induk batuan gamping dengan bentuk morfologi bergelombang sampai berbukit-bukit. Jenis tanah ini mendominasi wilayah Kecamatan Melaya (1.878 ha).

d) Tanah Regosol Cokelat Kelabu

Jenis tanah ini sebagian besar terdapat di Kecamatan Negara dan Kecamatan Jember seluas 772 ha dan di wilayah Kecamatan Mendoyo seluas 648 ha. Tanah ini terbentuk oleh induk vulkanik intermedier dengan bentuk wilayah landai sampai berombak.

e) Tanah Alluvial Hidromorf

Jenis tanah ini terdapat di wilayah Kecamatan Nagara dan Kecamatan Jember khususnya di sepanjang wilayah pantai selatan dan di sekitar Desa Pengambengan dan Desa Cupel. Luas jenis tanah ini kurang lebih 1420 Ha. Tanah ini merupakan sedimen darat dan laut yang dibentuk oleh lempeng pasir dan pecahan karang.

Masing masing jenis tanah tersebut diatas mempunyai tekstur yang berbeda-beda umumnya tekstur wilayah di Kabupaten Jember tergolong tekstur halus (kandungan liat sangat tinggi). Sedangkan tekstur kasar (pasir dan lempung berpasir) merupakan tekstur tanah yang terdapat di sepanjang pantai dari wilayah Kabupaten Jember.

Gambar 2.4
Peta Jenis Tanah Kabupaten Jember



Sumber : RTRW Kabupaten Jember 2012-2032



b. Potensi

Potensi Kawasan Pesisir dan Kepulauan, terbentang dari Gilimanuk Kecamatan Melaya sampai Desa Pengeragoan di Kecamatan Pekutatan memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata.

5) Hidrologi

Berdasarkan data Identifikasi, Inventarisasi/Pendataan Penamaan Unsur Rupabumi (Sungai) di Wilayah Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali Tahun 2011 yang dilakukan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana, sumber air permukaan di wilayah Kabupaten Jembrana terdiri dari air sungai, pangkung, tukad dan telabah.

Di daerah ini terdapat 44 sungai, 75 pangkung, 4 tukad dan 2 telabah yang mempunyai arahan aliran dari Utara (pegunungan) ke muara sungai di bagian Selatan yaitu Samudera Indonesia. Masing-masing sungai, pangkung, tukad dan telabah mempunyai daerah tangkapan hujan (*catchment area*) yang berbeda-beda. Sungai yang alirannya paling panjang adalah Sungai Yeh Sumbul sepanjang 70,90 km, dan terpendek adalah Sungai Perahu Mati yang hanya 1,00 km. Sumber air yang ada di wilayah Kabupaten Jembrana meliputi :

1. Air permukaan : air sungai, pangkung, tukad dan telabah, bendung Palasari
2. Air tanah : air yang bersumber dari bawah tanah
3. Mata air : terdapat 37 mata air dg kapasitas 110 l/det

Berdasarkan karakteristik alirannya, sungai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten Jembrana dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu sungai-sungai yang terletak di Bagian Darat dari wilayah Kabupaten Jembrana (sebelah Barat Tukad Melaya), sungai-sungai hanya mengalir pada musim hujan. Hal ini erat kaitannya dengan curah hujan yang sangat rendah di wilayah itu serta kondisi tanah yang berbentuk dari batuan gamping. Sedangkan kelompok sungai yang mengalir sepanjang tahun adalah sungai-sungai yang terletak diantara Tukad Klatakan disebelah Barat dan Tukad Pulukan disebelah Timur umumnya sungai-sungai tersebut tetap mengalir pada musim kemarau walaupun debit airnya sangat kecil.

Berdasarkan peta hidrogeologi daerah Kabupaten Jembrana dari Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan Sub. Direktorat Pendayagunaan Air Tanah (Tahun 1986) kondisi air tanah dan struktur geologi Kabupaten Jembrana dapat diuraikan sebagai berikut:

Terdapatnya air tanah dan produktivitas akuifer (*occurrence of groundwater and productivity of aquifers*) yaitu:

- a. Akuifer dengan aliran melalui ruang antar butir (*aquifers in which flow is intergranular*)
 - Akuifer produktif dengan penyebaran luas, berarti: Akuifer dengan keterusan sedang; muka air tanah atau tinggi pisometri air tanah dekat atau bawah muka tanah; debit sumur umumnya 5 sampai 10 ltr/dtk.



- Akuifer dengan produktivitas sedang, dan penyebaran luas berarti: akuifer dengan keterusan sedang sampai rendah; muka air tanah beragam dari atas atau dekat muka tanah sampai lebih dalam dari 10 m dibawah tanah, debit sumur umumnya kurang dari 5 ltr/dtk.
- Setempat akuifer dengan produktivitas sedang berarti: akuifer tidak menerus, tipis dengan keterusan rendah, debit sumur umumnya kurang dari 5 ltr/dtk.
- b. Akuifer (bercelah atau sarang) dengan produktivitas rendah dan daerah air tanah langka (*aquifers (fissured or product) of poor productivity and regions without exploitables groundwater*).
 - Akuifer dengan produktivitas rendah setempat berarti: umumnya keterusan sangat rendah, setempat air tanah dangkal dalam jumlah terbatas dapat diperoleh dilembah-lembah atau pada zona pelapukan.
 - Daerah air tanah langka.

Di samping air permukaan, sumber air lainnya adalah air tanah yaitu air yang bersumber dari bawah tanah. Keadaan air tanah dari suatu daerah sangat dipengaruhi oleh keadaan geologi dari keadaan tersebut. Disamping air permukaan dan air tanah sumber air yang lain adalah mata air (*spring*). Di Kabupaten Jemberana menurut data dari Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan Sub. Direktorat Pendayagunaan Air Tanah (Tahun 1986) konservasi air tanah daerah Kabupaten Jemberana yaitu sebagai berikut:

1. Daerah cekungan air tanah:

a. Daerah lepasan

- Zona aman pada akuifer kedalaman >30m bmt. Pengambilan air tanah dibatasi maksimal 540 m³/hari/sumur. Air tanah pada akuifer kedalaman <30 m bmt. Hanya diperuntukan bagi keperluan rumah tangga dengan pengambilan maksimal 100 m³/bulan/sumur.
- Zona aman. Aliran air tanah terbatas pada zona celahan, rekahan dan saluran pelarutan, dengan kedudukan muka air tanah dalam. Pengembangan air tanah lebih layak dilakukan dengan menurap mata air. Dapat difungsikan sebagai daerah resapan.

b. Daerah Resapan

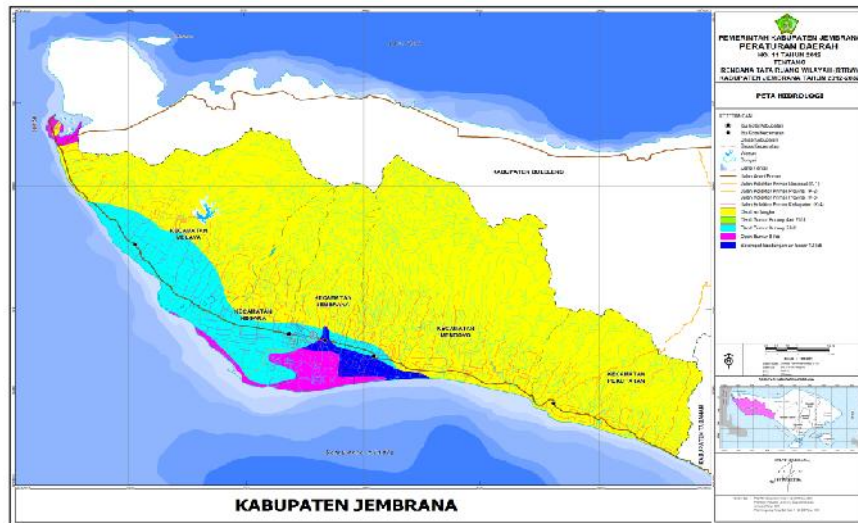
- Zona resapan, tidak untuk dikembangkan bagi berbagai peruntukan, kecuali untuk keperluan rumah tangga dengan pengambilan maksimal 100 m³/bulan/sumur, sedangkan untuk keperluan lain dapat dipertimbangkan setelah dilakukan kajian teknis hidrogeologi atau menurap mata air. Peruntukan lahan diupayakan untuk perkebunan atau hutan.

2. Daerah bukan cekungan air tanah:

- Zona bukan cekungan air tanah, produksifitas akuifer rendah, sehingga air tanah kurang layak dikembangkan, kecuali pada akuifer dangkal didaerah lembah dapat dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga

dengan debit maksimal 100 m³/bulan/sumur. Dapat difungsikan sebagai daerah resapan.

Gambar 2.5
Peta Hidrologi Kabupaten Jemberana



Sumber : RTRW Kabupaten Jemberana 2012-2032

6) Klimatologi

Ditinjau dari segi klimatologi, Kabupaten Jemberana mempunyai iklim tropis dengan penggantian musim yang jelas antara musim ter hujan dan musim kemarau. Jumlah curah hujan di Kabupaten Jemberana cukup tinggi. Hal ini didasarkan pada stasiun pencatat yang tersebar di masing-masing kecamatan bahwa curah hujan cukup tinggi terjadi pada awal dan akhir tahun 2013. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari sebesar 357,5 mm dan pada bulan Desember sebesar 303,7 mm. Sedangkan pada pertengahan tahun curah hujan tidak terlalu tinggi, tercatat pada bulan Agustus sebanyak 6.3 mm.

7) Penggunaan Lahan

a. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya terbagi menjadi dua yaitu budidaya pertanian dan budidaya non pertanian, Kabupaten Jemberana merupakan wilayah yang kaya akan berbagai sumberdaya alam termasuk didalamnya adalah pertanian.



Tabel 2.3
Penggunaan Lahan di Kabupaten Jember (Ha) Tahun 2014

No	Penggunaan Lahan	Kecamatan					Jumlah Total
		Melaya	Negara	Jember	Mendoyo	Pekutatan	
I	Lahan Pertanian						
I.1	Lahan Sawah	1.242	1.810	964	2.241	554	6.811
a	Irigasi	1.217	1.810	932	2.241	554	6.754
b	Tadah Hujan	25	0	32	0	0	57
I.2	Lahan Pertanian Bukan Sawah	4.223	5.040	3.602	7.407	5.560	25.832
a	Tegal/Kebun	1.215	1.925	1.612	121	4.512	9.385
b	Perkebunan	2.976	3.015	1.910	6.281	1.036	15.218
c	Lainnya (Tambak, Kolam, dll)	32	100	80	1.005	12	1.229
II.	Lahan Bukan Pertanian	14.254	5.800	4.831	19.801	6.851	51.537
	Jumlah	19.719	12.650	9.397	29.449	12.965	84.180

Sumber : BPS Kabupaten Jember

Dengan pemanfaatan lahan seperti tabel tersebut diatas, maka Kabupaten Jember memiliki potensi ekonomi dalam berbagai sektor, seperti; pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, industri mikro, industri kecil dan industri menengah hing industri besar. Potensi ekonomi Kabupaten Jember tersebut didukung pula oleh keharmonisan geografis, dimana letak daratan tinggi dan dataran rendah dengan pantai dalam pola “Nyegara Gunung” artinya harmoni keseimbangan alam pegunungan dan wilayah laut.

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi Umum Pemanfaatan lahan di Kabupaten Jember masih didominasi oleh kawasan non terbangun, sehingga untuk memperkuat fungsi wilayah perencanaan sebagai kawasan konservasi tidak ada kendala, namun harus mampu mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya yang ada. Secara geografis, lokasi wilayah perencanaan berada pada jalur penghubung regional menempatkan wilayah perencanaan sebagai kawasan yang cukup strategis. Posisinya yang menghubungkan antar pusat kegiatan nasional dan wilayah menjadikan interaksi dengan wilayah perencanaan menjadi tinggi. Wilayah Perencanaan memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat besar dan bernilai ekonomis. Potensi alam dan bentang alam wilayah perencanaan dengan panorama yang sangat eksotik, terutama hutan lindung dan budidaya serta berbagai obyek dan daya tarik wisata alam dan bahari menjadikan wilayah perencanaan sangat potensial untuk dikunjungi wisatawan. Potensi pengembangan wilayah dijabarkan dan dibagi atas kawasan, yaitu



a. Potensi Kawasan Lindung

- Potensi kawasan suaka alam meliputi cagar alam dan suaka margasatwa; melindungi kawasan bawahannya, melestarikan keanekaragaman flora dan fauna serta menjaga kelestarian tanaman. Sedangkan potensi suaka margasatwa adalah untuk pengembangan wisata alam dan pengembangan ilmu pengetahuan yang tetap mempertahankan kelestarian lingkungan, adapun Kawasan Suaka Alam di Kabupaten Jember adalah Kawasan Suaka Alam Laut di Kecamatan Melaya dan Gilimanuk yang merupakan bagian dari Taman Nasional Bali Barat.
- Potensi Kawasan Pelestarian Alam Terdiri dari Taman Nasional dan Taman Wisata Alam;
Taman Nasional dan taman wisata alam di Kabupaten Jember memiliki potensi sebagai kawasan hutan dengan komunitas tumbuhan dan satwa langka beserta ekosistemnya. Potensi yang dipertahankan adalah hutan primer dan hutan produksi, aneka flora langka seperti bayur, Ketangi, Burahol, Cendana, Snoorkling, dan lain-lain, berbagai pohon khas Bali yang tidak ditemukan di tempat lain atau istilahnya endemik seperti pohon ilang yang banyak tumbuh di kawasan ini, pohon sawo kecil, wali kukun, pohon intara, bunut, dan pohon serut serta satwa langka antara lain Jalak Bali, Ibis putih kepala hitam, Gangsa batu coklat, Kijang, Trenggiling, Landak, Kancil, Ikan hiu, Ikan bendera, Kima raksasa dan lain-lain.
- Potensi Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan terdiri dari Lingkungan Non Terbangun, Lingkungan Bangunan Gedung, dan halamannya Serta Kebun Raya;
Kabupaten Jember memiliki peninggalan budaya dan ilmu pengetahuan yang sangat penting, Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan di Kabupaten Jember meliputi Pura Peti Batu yang terletak di Kecamatan Negara, Situs Gilimanuk dan Monumen Lintas Laut Gilimanuk yang terletak di Kecamatan Melaya.
Budaya masyarakat dengan kearifan budaya lokal serta adat istiadatnya merupakan salah satu potensi wisata yang besar untuk dikembangkan lebih lanjut.
Terdapat pula Wisata budaya dan ziarah yakni Makam Mbah Temon dan Jayaprana yang dapat menjadi potensi wisata yang dapat dikembangkan lebih lanjut.
- Potensi Kawasan Perlindungan Bawahannya Terdiri dari Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Resapan Air dan Kawasan Karst Kelas I;
Kawasan perlindungan bawahannya di Kabupaten Jember memiliki potensi untuk melindungi/memperkecil bahaya tanah longsor atau banjir menuju kawasan bawahannya, melalui peresapan air ke dalam tanah dapat meningkatkan volume air tanah, dan melindungi flora dan fauna yang masih berkembang untuk menghindari kepunahan.
- Potensi Kawasan Perlindungan Setempat Terdiri dari Kawasan Sekitar Mata Air, Kawasan Sekitar Waduk/Danau, Kawasan Sekitar Sempadan Sungai, Pantai, Kawasan Sekitar Sempadan Sungai di Kawasan



Permukiman, Kawasan Pantai Berhutan Bakau/Mangrove, Kawasan Terbuka Hijau Kota, Kawasan Suci, dan Kawasan Kesucian Pura; adanya kawasan-kawasan suci yang dipandang memiliki nilai kesucian (kawasan Suci) oleh umat Hindu di Bali seperti kawasan gunung, danau, campuhan, pantai, laut dan mata air memudahkan dalam pengelolaan dan pengamanan terhadap kawasan perlindungan setempat, begitu pula dengan penetapan kawasan radius kesucian pura atau daerah *kekeran* dimana dalam suatu kawasan yang hanya boleh ada bangunan yang terkait dengan kehidupan keagamaan (Hindu), misalnya pendirian *Dharmasala*, *Pasraman* dan sebagainya, bagi kemudahan umat Hindu melakukan kegiatan keagamaan, sebaran lokasi radius kesucian pura berada disekitar lokasi pura-pura Dhang Kahyangan yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Jember.

b. Potensi Kawasan Budidaya

- Potensi Hutan produksi;
selain memiliki fungsi ekonomi utama hasil kayu, juga memiliki hasil sampingan dan perlindungan kawasan sebagai kawasan lindung, maka segala kegiatan dan pengembangan daerah terbangun harus dikendalikan secara ketat. Kawasan hutan produksi dapat mendukung keanekaragaman hayati.
- Pengembangan lahan pertanian;
dikembangkan sesuai dengan kondisi irigasi di masing-masing wilayah Kabupaten. Pertanian di Kabupaten Jember merupakan sektor yang masih mendominasi struktur ekonomi Kabupaten Jember, secara umum Kabupaten Jember memiliki potensi sebagai salah satu lumbung padi nasional, merupakan wilayah penghasil tanaman pangan dengan berbagai komoditas unggul, wilayah penghasil tanaman hortikultura dengan kualitas ekspor.
- Potensi perikanan;
budidaya air tawar, sangat besar dan belum sepenuhnya dikembangkan, hasil budidaya perikanan budidaya air tawar juga belum banyak diolah sehingga tidak memberi nilai tambah yang besar. Salah satu potensi perikanan yang memiliki nilai ekonomis tinggi adalah budidaya ikan air laut (tambak) dan penangkapan ikan air laut yang telah didukung dengan adanya Pelabuhan Pelelangan Ikan dan pengembangan teknologi pengolahan ikan air laut pasca panen.
- Potensi Peternakan;
ternak besar (sapi, babi, kambing, kerbau, kuda dan domba), maupun unggas (ayam dan itik) cukup besar di Kabupaten Jember. Peternakan ini memiliki potensi untuk diolah menjadi komoditas yang bernilai ekonomis tinggi. Penduduk Kabupaten Jember mayoritas beragama Hindu membutuhkan babi untuk berbagai keperluan selain dikonsumsi juga untuk keperluan upacara, selain babi populasi kedua banyak dipelihara adalah sapi. Sapi di samping dipotong untuk dikonsumsi dagingnya oleh



masyarakat Jemberana, juga dikirim antar pulau ke Jawa, terutama ke Jakarta.

- Potensi pariwisata;
banyaknya dan beragamnya objek dan daya tarik pariwisata di Kabupaten Jemberana yang dapat menarik pangsa pasar, namun belum optimal dikembangkan. Keindahan alam dan pantai yang masih alami, Taman Nasional Bali Barat, Bangunan-bangunan yang suci dan berbagai atraksi budaya yang dapat dijumpai diseluruh wilayah Kabupaten Jemberana merupakan potensi yang sangat besar bagi perkembangan wisata di Kabupaten ini.
- Potensi pengembangan Permukiman;
permukiman perdesan dan perkotaan yang terintegrasi dapat mendorong terjadinya keseimbangan perkembangan wilayah sekaligus mendorong pertumbuhan secara lebih merata. Masing-masing kawasan permukiman dikembangkan sesuai potensi masing-masing akan dapat mempercepat pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan serta wilayah sekitarnya.
- Potensi pengembangan industri;
dengan kebijakan pengembangan industri kecil dan menengah melalui pemberian kemudahan dalam akses produksi, distribusi dan pemasaran dengan program pembinaan dan pengembangan industri. Area industrialisasi di Kabupaten Jemberana masih terbuka bagi investor, kondisi tersebut dapat ditunjukan adanya kawasan industri yang berkembang di Pengambengan, sektor industri yang berpotensi untuk dikembangkan adalah industri perikanan dan Kerajinan, selain industri tersebut pengembangan industri Agrobisnis di Kabupaten Jemberana menunjukan potensi yang sangat besar untuk dikembangkan.
- Potensi pertambangan;
Pengembangan pertambangan di Kabupaten Jemberana berdasarkan hasil analisis ekonomi bukan merupakan Skala Prioritas Pengembangan sektor di Kabupaten Jemberana hal ini dikarenakan potensi pengembangan sektor ini sangat kecil dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya di Kabupaten Jemberana.
- Potensi Perdagangan;
khususnya melalui Kota Negara memiliki potensi perdagangan skala wilayah dan nasional.
- Potensi kawasan pusat pemerintahan dan core Budaya;
ketersediaan fasilitas yang cukup dengan berbagai inovasi sehingga dapat melayani seluruh wilayah di Kabupaten Jemberana dan menjadi “wajah” kebudayaan masyarakat Kabupaten Jemberana.

c. Potensi Kawasan strategis

Kabupaten Jemberana memiliki beberapa kawasan strategis yang dapat diprioritaskan dalam penanganannya, kawasan tersebut memberikan potensi yang besar terhadap pembangunan, merupakan kawasan yang dapat memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat, memiliki potensi



sebagai kawasan yang dikendalikan tata ruangnya, dan kawasan yang berpotensi mendorong perkembangan kawasan sekitar dan atau berpengaruh terhadap perkembangan Kabupaten Jember secara umum.

d. Potensi Kawasan Pesisir Dan Kepulauan

Kawasan pesisir di Kabupaten Jember terbentang dari Gilimanuk di Kecamatan Melaya sampai Desa Pengeragoan di Kecamatan Pekutatan memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata dan keaneka-ragaman hayati yang bernilai ekonomi tinggi seperti berbagai jenis ikan, udang dan kerang, yang kesemuanya merupakan aset yang sangat strategis untuk dikembangkan dengan basis kegiatan ekonomi pada pemanfaatan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan (environmental service).

Kawasan pulau-pulau kecil di Kabupaten Jember merupakan kawasan hutan lindung Taman Nasional Bali Barat, pemanfaatan secara ekonomi terhadap pulau kecil adalah pengembangan objek dan daya tarik wisata terbatas.

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Kawasan rawan bencana di Kabupaten Jember meliputi Kawasan rawan banjir, rawan tanah longsor, rawan gelombang pasang dan rawan abrasi pantai.

a) Kawasan Rawan Banjir

Kawasan rawan bencana banjir seluas kurang lebih 200 hektar, meliputi:

Kawasan Desa Pangyangan dan Lingkungan Koprahan di kecamatan Pekutatan karena meluapnya sungai Banjar Yeh Lebah; dan

Kawasan di Kelurahan Baler Bale Agung, Kelurahan Lelateng, Kelurahan Loloan Barat dan Desa Pengambengan karena buruknya sistem drainase kota.

b) Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor

Kawasan rawan bencana tanah longsor tersebar terutama di Kawasan Hutan Lindung wilayah Desa Berangbang di Kecamatan Negara, Desa Manggissari dan Desa Yeh Sumbul di Kecamatan Mendoyo.

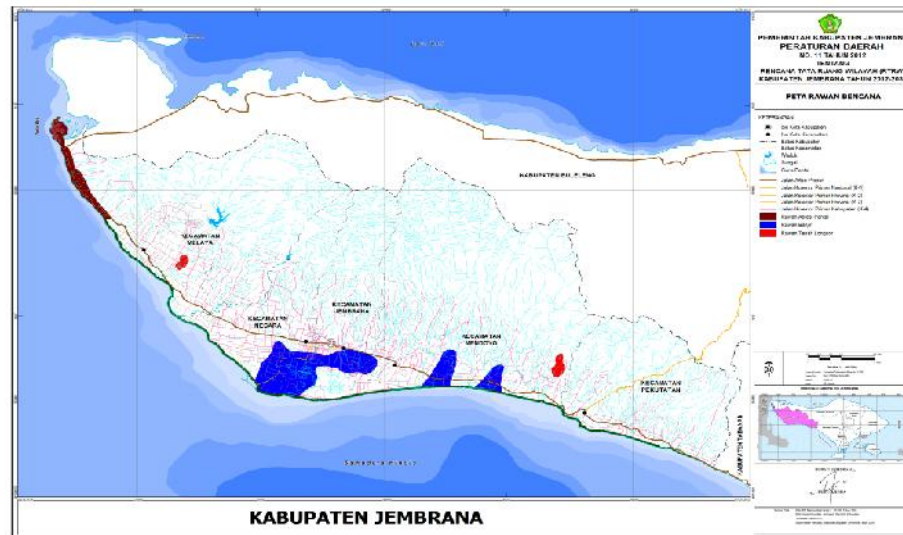
c) Kawasan Rawan Gelombang Pasang

Kawasan rawan gelombang pasang, tersebar pada sepanjang kawasan pesisir pantai Kabupaten Jember terdiri dari :

1. Kawasan pantai Desa Gilimanuk, Desa Melaya, Desa Candikusuma, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya;
2. Kawasan pantai Desa Banyubiru, Desa Baluk, Desa Cupel, Desa Tegal Badeng Barat, dan Desa Pengambengan Kecamatan Negara;
3. Kawasan pantai Desa Perancak, Desa Air Kuning, Desa Yeh Kuning, Kecamatan Jember;
4. Kawasan pantai Desa Delod Berawah, Desa Penyaringan, Desa Yeh Embang Kauh, Desa Yeh Embang, Desa Yeh Embang Kangin dan Desa Yeh Sumbul Kecamatan Mendoyo;

5. Kawasan pantai Desa Medewi, Desa Pulukan, Desa Pekutatan, Desa Panyangan, Desa Gumbrih dan Desa Pengeragoan, Kecamatan Pekutatan.
- d) Kawasan Rawan Abrasi Pantai
Kawasan rawan abrasi pantai, sebarannya berada pada kawasan pesisir pantai Kabupaten Jemberana. Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Jemberana dapat dilihat pada Gambar dibawah ini:

Gambar 2.6
Peta Rawan Bencana Kabupaten Jemberana



Sumber : RTRW Kabupaten Jemberana 2012-2032

2.1.4 Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Jemberana pada Tahun 2015 adalah 311.995 jiwa terdiri dari laki-laki 156.368 jiwa dan perempuan 155.627 jiwa. Perbandingan penduduk laki-laki dengan perempuan (Sex Ratio) di Kabupaten Jemberana pada tahun 2015 mencapai 100.48. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Jemberana dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sesuai pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Jemberana
Tahun 2010 – 2015

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Sex Rasio
1	2010	307.804	99.80
2	2011	311.573	99.80
3	2012	317.117	99.80
4	2013	321.008	99.80
5	2014	320.260	100.08
6	2015	311.995	100.48

Sumber : Buku Agregat Semester I Th 2015 Kabupaten Jemberana



Sedangkan persebaran penduduk Tahun 2015 di tiap-tiap kecamatan tidak merata di semua kecamatan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.5
Penduduk Kabupaten Jemberana Tiap Kecamatan Berdasarkan
Jenis Kelamin Tahun 2015

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jml Pddk	%
1	Melaya	30.154	29.772	59.926	19,20
2	Negara	46.734	46.044	92.778	29,73
3	Jemberana	29.731	29.879	59.610	19,10
4	Mendoyo	34.751	34.912	69.663	22,33
5	Pekutatan	14.998	15.020	30.018	9,62
Total		156.368	155.627	311.995	100

Sumber : Buku Agregat Semester I Th 2015 Kabupaten Jemberana

Dengan jumlah penduduk sebesar 311.995 jiwa dan luas wilayah 841,80 km², Kepadatan Penduduk mencapai 371 Jiwa/km². Jumlah penduduk tertinggi terkonsentrasi di Kecamatan Negara yang mencapai 29,73% dari total jumlah penduduk. Kepadatan penduduknya mencapai hampir 2 (dua) kali lipat kepadatan penduduk Kabupaten Jumlah penduduk terendah ada di Kecamatan Pekutatan hanya 9,62% dari total jumlah penduduk Kabupaten dengan jumlah penduduk 30,018 jiwa.

Struktur Usia penduduk di Kabupaten Jemberana berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Penduduk Kabupaten Jemberana Menurut Kelompok Umur
Jenis Kelamin Tahun 2015

KelompokUmur	Laki-laki(x1000)	Perempuan(x1000)	Jumlah(x1000)
<i>AgeClassification</i>	<i>Male</i>	<i>Female</i>	<i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	12,912	9,827	20,739
5-9	13,703	12,991	26,694
10-14	13,727	12,918	26,645



15–19	12,687	12,047	24,734
20–24	11,707	11,540	23,247
25–29	10,757	10,940	21,697
30–34	12,300	12,202	24,502
35–39	13,027	12,702	25,729
45–49	12,703	12,753	25,456
50–54	11,151	11,049	22,200
55–59	9,895	10,340	20,235
60–64	9,895	5,261	11,014
65–69	3,997	4,723	8,720
70–74	2,867	3,252	6,119
75+	3,256	4,762	8,018
Jumlah/Total	156,368	155,627	311,995

Sumber : Buku Agregat Semester I Th 2015 Kabupaten Jemberana

Dilihat dari tabel diatas, jumlah penduduk Kabupaten Jemberana pada usia produktif 15 s/d 54 tahun cukup tinggi sebanyak 221.672 orang mencapai 71% dari total jumlah penduduk dan ini merupakan potensi Sumber Daya Manusia untuk pembangunan di Kabupaten Jemberana sehingga memerlukan pengelolaan yang baik agar betul-betul mejadi sumber daya yang produktif dan bermanfaat bagi pembangunan khususnya di Kabupaten Jemberana.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Permendagri Nomor 54 tahun 2010, Aspek Kesejahteraan Masyarakat terdiri atas:

- Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi,
- Fokus Kesejahteraan Masyarakat dan
- Fokus Senibudaya dan Olahraga.

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ditunjukkan dengan pertumbuhan PDRB, Laju Inflasi, PDRB Perkapita, Indeks Gini, dan Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan.

**1) Pertumbuhan PDRB Kabupaten Jember**

Struktur perekonomian Kabupaten Jember berdasarkan indikator distribusi persentase nilai tambah bruto sektoral, meliputi 17 lapangan usaha yang meliputi Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan. Dalam kurun waktu periode tahun 2011-2015 struktur perekonomian Kabupaten Jember mengalami sedikit pergeseran/ perubahan seperti diagram berikut :

Tabel 2.7
PDRB Menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku
Kabupaten Jember Tahun 2011– 2015

Dalam Juta Rp/ In Million of Rp

Lapangan Usaha	2011	2012	2013*	2014**	2015*
1	2	3	4	5	6
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan <i>Agriculture, Forestry, & Fishing</i>	1.416.013,56	1.524.157,38	1.648.866,2	1.850.134,2	
B. Pertambangan dan Penggalian <i>Mining and Quarrying</i>	63.362,61	74.071,9	82.867,5	91.863,4	
C. Industri Pengolahan <i>Manufacturing Industry</i>	311.124,04	341.071,1	380.969,9	442.429,5	
D. Pengadaan Listrik dan Gas <i>Electricity & Gas</i>	7.035,33	6.798,7	6.540,5	8.497,2	
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur <i>Water Supply, Sewerage, Waste Management & Remediation Activities</i>	6.986,86	7.053,1	7.421,4	8.188,4	
F. Konstruksi <i>Construction</i>	588.338,92	736.072,1	804.388,3	862.256,3	
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda <i>Wholesale & Retail Trade; Repair of Motor Vehicles & Motorcycles</i>	655.215,85	698.796,8	796.395,8	889.811,5	
H. Transportasi dan Pergudangan <i>Transportation & Storage</i>	937.357,59	1.063.822,5	1.241.712,6	1.538.797,8	
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum <i>Accommodation & Food Service Activities</i>	813.462,50	920.075,4	1.074.369,8	1.327.112,0	
J. Informasi dan Komunikasi <i>Information & Communication</i>	393.047,53	418.169,6	434.260,1	480.746,0	
K. Jasa Keuangan dan Asuransi <i>Financial & Insurance Activities</i>	182.969,19	214.001,4	249.709,3	288.916,2	
L. Real Estate <i>Real Estate Activities</i>	348.353,05	371.324,5	409.692,4	470.073,3	
M, N. Jasa Perusahaan <i>Business Activities</i>	47.122,43	49.971,3	55.333,6	63.641,3	
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan <i>Public Administration & Defence; Compulsory Social Security</i>	202.750,10	203.087,5	202.577,7	232.312,2	
P. Jasa Pendidikan <i>Education</i>	120.289,84	125.427,4	150.923,0	175.146,5	
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial <i>Human Health & Social Work Activities</i>	115.963,24	126.138,2	146.541,1	169.890,2	
R, S, T, U. Jasa Lainnya <i>Other Services Activities</i>	86.139,93	92.910,7	104.284,8	119.900,8	
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) / Gross Regional Domestic Products (GDRP)	6.295.532,55	6.972.949,70	7.769.853,83	9.019.716,82	

Sumber : BPS Kabupaten Jember.

Ket : *) angka sementara, **) angka sangat sementara



Berdasarkan tabel tersebut, kontribusi dibidang pertanian,Transportasi dan Pergudangan masih dominan menyusul, bidang Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum,Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda, Kontruksi, Informasi dan Komunikasi, Industri Pengolahan, terlihat bahwa kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB setiap tahun mengalami peningkatan, keadaan ini merupakan salah satu indikator bahwa Kabupaten Jemberana merupakan daerah agraris dan sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor pertanian dan Perdagangan dalam arti luas.

Berikut dapat disajikan perbandingan besaran PDRB Kabupaten Jemberana berdasarkan Harga Konstan dan Harga Berlaku dari Tahun 2011– 2014 sebagai berikut :

Tabel 2.8
PDRB Atas Dasar Harga Konstan, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Jemberana Tahun 2011 – 2015

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (dalam jutaan Rp)	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (dalam jutaan Rp)
2011	1.836.899,81	3.936.308,26
2012	6.365.857,71	6.972.949,70
2013	6.727.786,41	7.769.853,83
2014	7.134.660,29	9.019.716,82
2015		

Sumber: Data BPS Kabupaten Jemberana

2) Laju Inflasi

Inflasi merupakan persentaseharga sejumlah barang dan jasa yang secara umum di konsumsi rumah tangga semakin tinggi prosentase inflasi akan berdampak pada redistribusi pendapatan diantara anggota masyarakat inflasi jugadapat menyebabkan penurunan dalam efisiensi ekonomi, kesempatan kerja dan memperlemah daya saing ekspor di pasar internasional jika inflasi terlalu tinggi akan berdampak kepada instabilitas lingkungan. Pada tahun 2011laju inflasi Kabupaten Jemberana sebesar 3,75 %, pada tahun 2012 sebesar 4,71 % kemudian tahun 2013 sebesar7,35%Pada tahun 2014 mencapai 8,43% dan tahun 2015 mencapai 1,68%.

3) PDRB Per Kapita Kabupaten Jemberana Tahun 2010 - 2014

PDRB per Kapita merupakan suatu indikator yang dihitung dengan cara membagi data PDRB terhadap jumlah penduduk pada pertengahan tahun. PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Jemberana tahun 2011-2014 menunjukkan kecenderungan meningkat. Tahun 2010PDRB per Kapita Kabupaten Jemberana mencapai Rp. 21.574.943,34 meningkat menjadi



Rp 33.431.122,40 pada tahun 2014 atau meningkat rata-rata sebesar 13,74 persen.

4) Indeks Gini

Gini Ratio merupakan angka yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan daerah secara menyeluruh. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 bahwa tentang gini ratio dikelompokkan kedalam ketimpangan rendah apabila gini ratio tinggi lebih kecil dari 0,3, dikategorikan ketimpangan sedang apabila gini rasionya lebih besar dari 0,3 dan lebih kecil dari 0,5, selanjutnya dikategorikan ketimpangan tinggi apabila gini rasionya lebih besar dari 0,5. Berikut dapat disajikan perkembangan gini ratio Kabupaten Jembrana untuk kurun waktu 2011 – 2015 pada tabel berikut :

Tabel 2.9
Gini Ratio Kabupaten Jembrana
Tahun 2011 – 2015

No	Tahun	Gini Ratio
1	2011	0.4020
2	2012	0.3706
3	2013	0.3710
4	2014	0.3863
5	2015	

Sumber data : BPS Provinsi Bali

Bila diperhatikan tabel tersebut diatas dalam kurun waktu 2011 – 2015 Kabupaten Jembrana Gini Rasionya terkatagorikan ketimpangan rendah. Kondisi tersebut mencerminkan tingkat pendapatan masyarakat di Kabupaten Jembrana cenderung merata atau gap antara rumah tangga kaya dan rumah tangga miskin cenderung kecil. Oleh sebab itu pertumbuhan ekonomi diharapkan merata di masing – masing sektor (15 sektor). Pada tahun 2014 ketimpangan Gini Ratio meningkat sehingga perlu diupayakan rendah kembali.

5) Persentase Penduduk Miskin

Untuk mengetahui proporsi dan jumlah penduduk miskin, tersedia dua sumber data, yaitu data yang dikeluarkan BPS setiap tahun, dan jumlah rumah tangga miskin yang pendataannya dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Kedua jenis data tersebut berbeda dalam beberapa hal. Pertama, data BPS adalah hasil survei, tanpa nama dan tanpa alamat. Alat ukurnya juga berbeda, yaitu pola konsumsi masyarakat, yang kemudian disimpulkan menjadi kilokalori. Bila konsumsi per orang dibawah 2100 kilokalori per hari maka dikategorikan sebagai penduduk miskin. Data yang dikeluarkan BPMPD Kabupaten Jembrana merupakan data sensus yang dilakukan



setiap tahun. Adapun indikator yang digunakan adalah 14 indikator local yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Jemberana berdasarkan indikator-indikator yang dimiliki berbagai kementerian/lembaga ditambah 3 indikator intervensi.

Seiring dengan peningkatan ekonomi, berdasarkan data BPMPD jumlah KK miskin juga terus mengalami penurunan berturut-turut adalah: tahun 2011 sebesar 7,0% menurun menjadi 6,1 % pada tahun 2012, menurun lagi pada tahun 2013 menjadi 5,3% tahun 2014 sebesar 4,60% dan tahun 2015 menjadi 4,3%. Persentase penduduk di atas garis kemiskinan dihitung berdasarkan persentase KK miskin $P = 100\% - \% \text{ KK miskin}$. Dengan demikian maka persentase KK di atas garis kemiskinan berturut-turut adalah: tahun 2011 sebesar 93 % meningkat menjadi 93,9 % pada tahun 2012, meningkat lagi menjadi 94,7% pada tahun 2013, 95,40% pada tahun 2014 dan di tahun 2015 meningkat menjadi 95,7%.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

1) Angka Melek Huruf

Angka Melek huruf Kabupaten Jemberana selama lima tahun dapat dilihat pada tabel 2.10

Tabel 2.10
Angka Melek huruf Kabupaten Jemberana
Tahun 2011– 2015

Tahun	Angka Melek Huruf(AMH)
(1)	(2)
2011	90,69
2012	91,36
2013	92,65
2014	98,88
2015	90,30

Sumber data : BPS Provinsi Bali

2) Angka rata-rata lama sekolah

Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Jemberana selama lima tahun dapat dilihat pada tabel 2.11



Tabel 2.11
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Jemberana
Tahun 2011– 2015

Tahun	Angka Rata-rata Lama Sekolah
(1)	(2)
2011	7,80
2012	7.80
2013	7.87
2014	7.87
2015	7,3

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jemberana Tahun 2015

3) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Jemberana tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 2.12

Tabel 2.12
Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kabupaten Jemberana Tahun 2011 - 2015

Tahun	AngkaPartisipasiKasar(APK)		
	SekolahDasar (SD)	SekolahMenengahPertama (SMP)	SekolahMenengahAtas (SMA)
2011	113,94	116,98	98,07
2012	113,95	117,01	98,21
2013	108,75	119,85	98,71
2014	106,46	128,83	114,75
2015	107,34	131.83	123.54

Sumber data : Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jemberana Tahun 2015

4) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Jemberana tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 2.13

Tabel 2.13
Angka Partisipasi Murni (APM)
Kabupaten Jemberana Tahun 2011 - 2015

Tahun	AngkaPartisipasiMurni(APM)		
	SekolahDasar (SD)	SekolahMenengahPertama (SMP)	SekolahMenengahAtas (SMA)
2011	98,43	93,85	74,96
2012	98,71	93,97	86,03
2013	96,28	99,12	89,10
2014	93,09	98,74	82,87
2015	94,50	99.55	6.14

Sumber data : Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jemberana Tahun 2015



5) Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka Kematian Balita Kabupaten Jemberana selama lima tahun dapat dilihat pada tabel 2.14

Tabel 2.14
Angka Kematian Balita Kabupaten Jemberana
Tahun 2011 – 2015

Tahun	Angka Kematian Balita (AKABA)
(1)	(2)
2011	14,52
2012	11,47
2013	6,70
2014	8,77
2015	7,5

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jemberana Tahun 2015

6) Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi Kabupaten Jemberana selama lima tahun dapat dilihat pada tabel 2.15

Tabel 2.15
Angka Kematian Bayi Kabupaten Jemberana
Tahun 2011– 2015

Tahun	Angka Kematian Bayi (AKB)
(1)	(2)
2011	9.16
2012	10.63
2013	6.93
2014	7,5
2015	5,8

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jemberana Tahun 2015

7) Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu Kabupaten Jemberana selama lima tahun dapat dilihat pada tabel 2.16

Tabel 2.16
Angka Kematian Ibu Kabupaten Jemberana
Tahun 2011– 2015

Tahun	Angka Kematian Ibu/100.000 KH
(1)	(2)
2011	93,60
2012	125.10
2013	69.09
2014	42,8
2015	145,7

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jemberana Tahun 2015



8) Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup Kabupaten Jemberana selama lima tahun dapat dilihat pada tabel 2.17

Tabel 2.17
Usia Harapan Hidup Kabupaten Jemberana
Tahun 2011– 2015

Tahun	Usia Harapan Hidup
(1)	(2)
2011	71,8
2012	71,8
2013	71,8
2014	71,8
2015	71,8

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jemberana Tahun 2015

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator. Jumlah grup kesenian dan jumlah gedung Kesenian.

Tabel 2.18
Capaian Kinerja Kebudayaan Kabupaten Jemberana
Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1.	Jumlah Group Kesenian	491	491	495	556	556
2	Gedung Kesenian.	2	2	4	4	4

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jemberana Tahun 2015

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa urusan pemerintahan terdiri dari:

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

Capaian kinerja atas layanan urusan wajib meliputi bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga,



kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika dan perpustakaan. Berikut disajikan capaian kinerja dari masing-masing urusan wajib:

1) *Urusan Pendidikan*

Capaian kinerja urusan pendidikan diukur dengan indikator: Angka Partisipasi Sekolah SD/MI, Rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah SD/MI, Rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah SMP/MTs, Rasio guru: murid SD/MI, Rasio guru: murid SMA/MA, Rasio guru: murid per kelas rata-rata SD/MI, Rasio guru: per kelas rata-rata murid SMP/MTs, Rasio guru: per kelas rata-rata murid SMA/ MA, dan Rasio ketersediaan sekolah SLTP.

Tabel 2.19
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Jemberana
Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI (%)	98,50	98,53	98,94	93,09	117.75
2	Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI	1:135	1:135	1:135	1:135	1:133
3	Rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah SMP/MTs	1:364	1:341	1:320	1:317	1:308
4	Rasio ketersediaan sekolah SMA	1:669	1:662	1:628	1:585	1:352
5	Rasio guru: murid.SD/MI	1/19	1/19	1/19	1/19	1:17
6	Rasio guru: murid.SMA/MA	1/21,7	1/13	1/13	1/13	1:13
7	Rasio guru: murid.per kelas rata-rata SD/MI	1/1,3	1/1,2	1/9	1/9	1:9
8	Rasio guru: per kelas rata-rata murid.SMP/MTs	1/1,3	1/2	1/1,4	1/1,4	1:14
9	Rasio guru: per kelas rata-rata murid.SMA/MA	1/1,3	1/2	1/1.3	1/2,8	1:3

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jemberana Tahun 2015

2) *Urusan kesehatan*

Capaian kinerja layanan umum dalam urusan kesehatan diukur dengan indikator kinerja: Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), Gizi Buruk, Umur Harapan Hidup, Ratio Posyandu per-100 balita, Ratio puskesmas, Poliklinik, postu per-10.000 penduduk, Ratio Rumah Sakit Per-100.000 Penduduk, Ratio Dokter per-



100.000 penduduk, Ratio Bidan per-100.000 Penduduk, Ratio Perawat Per-100.000 penduduk.

Tabel 2.20
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Jember
Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Angka Kematian Ibu	93,60	125,10	69,09	42,8	145,7
2	Angka Kematian Bayi	9,16	10,63	6,93	7,5	5,8
3	Angka Kematian Balita	14,52	11,47	6,70	8,77	7,5
4	Gizi Buruk	0,01	0,44	0,41	0,05	0,03
5	Usia Harapan Hidup	71,8	71,8	71,8	71,8	71,8
6	Rasio Posyandu per Satuan 100 Balita	-	2,63	2,59	1,59	2
7	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 10.000 penduduk	4,55	4,55	4,55	2	2
8	Rasio Rumah Sakit per 100.000 Penduduk	1,30	1,30	1,30	1,11	1,11
9	Rasio Dokter per 100.000 Penduduk	25,21	27,66	33,16	34,84	27,98
10	Rasio Bidan per 100.000 Penduduk	40,52	71,34	111,70	174,39	12,43
11	Rasio perawat per 100.000 Penduduk	-	-	-	71,53	2,21
12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	103,14	99,40	94,95	103,3	102,91
13	Cakupan desa kelurahan UCI	100%	100%	100%	100%	100%
14	Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100 %
15	Angka Kesakitan	18,10	14,36	13,10	29,8	56,78

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Jember Th 2015

3) *Urusan Pekerjaan Umum*

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pekerjaan Umum diukur dengan indikator kinerja antara lain: Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi baik, Rasio Jaringan Irigasi, Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk, Persentase rumah tinggal bersanitasi, Rasio Tempat Pemakaman umum per Satuan Penduduk, Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk, Rasio Rumah Layak Huni, Rasio Pemukiman Layak Huni, Panjang jalan dilalui roda empat, Jalan penghubung kabupaten dari ibu kota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4, Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik, dan panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air minimal 1,5 m.



Tabel 2.21
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Jember
Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik (%)	82,98	84,14	89,14	94,14	96
2	Rasio Jaringan Irigasi (m/ha)	66	72	80,80	89,60	64,14
3	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	85,67	92,39	92,39	76	91,73

Sumber: Dinas PU Kab. Jember Th 2012

4) Urusan Perumahan

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perumahan diukur dengan indikator: Rumah tangga pengguna air bersih, Rumah tangga pengguna listrik, Rumah tangga bersanitasi, Lingkungan pemukiman kumuh dan Rumah layak huni.

Tabel 2.22
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Kabupaten Jember
Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1.	Rumah tangga pengguna air bersih (%)	94,51	96,61	91,54	91	57,77
2.	Rumah tangga pengguna listrik	72	-	-	-	-
3.	Rumah tangga bersanitasi (%)	93,29	94,69	92,69	76	68,76
4.	Rumah layak huni (%)	91,99	92,39	92,39	83,01	93,11

Sumber: Dinas PU Kab. Jember Th 2015

5) Urusan Penataan Ruang

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Tata Ruang diukur dengan indikator: Rasio ruang terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB dan Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan.

Tabel 2.23
Capaian Kinerja Urusan Tata Ruang Kabupaten Jember
Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1.	Rasio ruang terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (%)	25	25	25	44	44
2.	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan (%)	25,8	22,9	26,34	30	4,41

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kab. Jember Th 2015



6) *Urusan Perencanaan Pembangunan,*

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perencanaan Pembangunan diukur dengan indikator: Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda, Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan, Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada, dan Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD.

Tabel 2.24
Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jemberana Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1.	Jumlah dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	1	1	1	1	1
3.	Jumlah dokumen RKPD, KUA dan PPAS	5	5	5	5	5
4.	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Bappeda dan PM Kab. Jemberana Th 2015

7) *Urusan Perhubungan,*

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perhubungan diukur dengan indikator: Jumlah arus penumpang angkutan umum, rasio Ijin trayek, Jumlah uji kir angkutan umum, Jumlah Pelabuhan Laut /udara/Terminal Bis, Angkutan Darat.

Tabel 2.25
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Jemberana Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1.	Arus penumpang angkutan umum (%)	48,58%	49,16%	53,01%	49,17%	64,59%
2.	rasio Ijin trayek(%)	33,47%	22,04%	6,53%	24,08%	18,78%
3.	Jumlah uji kir angkutan umum (kali)	2428	3050	3280	3562	3712
4.	Jumlah Pelabuhan Laut /udara/Terminal Bis	2	2	2	2	2

Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jemberana Th 2015

8) *Urusan Lingkungan Hidup*



Capaian kinerja layanan umum pada urusan Lingkungan Hidup diukur dengan indikator: Persentase penanganan sampah, Pencemaran status mutu air, Cakupan pengawasan terhadap dokumen lingkungan, Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk dan Penegakan hukum lingkungan.

Tabel 2.26
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Jemberana
Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Persentase penanganan sampah	77,22	77,35	77,50	77,58	77,78
2	Pengelolaan kualitas air (kali penetapan kelas air)	1	2	2	2	8
3	Cakupan pengawasan terhadap dokumen lingkungan (%).	100	100	100	100	100
4	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (%)	32	32	36	36	28
5	Penegakan hukum lingkungan (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pertanian Kab. Jemberana Th 2015

9) Urusan Pertanahan

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pertanahan diukur dengan indikator Persentase luas lahan bersertifikat, Penyelesaian kasus tanah negara dan Penyelesaian izin lokasi.

Tabel 2.27
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kabupaten Jemberana
Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Persentase luas lahan bersertifikat (%)	47,09%	47,09%	62,05%	64,92%	64,93%
2	Penyelesaian kasus tanah negara(%)	100%	100%	100%	100%	100%
3	Penyelesaian izin lokasi(%)	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kab. Jemberana Th 2015

10) Kependudukan dan Catatan Sipil

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kependudukan dan Catatan Sipil diukur dengan indikator persentase Kepemilikan KTP dan Kepemilikan Akta kelahiran.

Tabel 2.28



Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Capil Kabupaten Jemberana Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	% kepemilikan KTP	81,08	82,70	83,45	84,56	89,68
2	% kepemilikan akta kelahiran	19,10	25,12	28,78	30,61	32,81

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Jemberana Th 2015

11) *Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diukur dengan indikator: Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, Partisipasi perempuan di lembaga swasta, Rasio KDRT, Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur, Partisipasi angkatan kerja perempuan, dan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan.

Tabel 2.29

Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jemberana Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	2,25	3,24	3,25	3,57	3,57
2	Rasio KDRT (kali dalam setahun)	14	49	46	9	21
3	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur (%)	0,03	-	-	-	-
4	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Jemberana Th 2015

12) *Urusan Keluarga berencana dan keluarga sejahtera*

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera diukur dengan indikator: Rata – rata jumlah anak per keluarga, Rata – rata jumlah anak per keluarga, Cakupan peserta KB aktif, dan Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I.

Tabel 2.30



Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Jemberana Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Rata – rata jumlah anak per keluarga	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
2	Rasio akseptor KB (%)	88,74	88,81	88,25	85,45	88,45
3	Cakupan peserta KB aktif (%)	88,74	88,81	88,25	85,45	88,45
4	Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I(%)	7,77	8,49	8,54	13,22	13,22

Sumber: Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Jemberana Th 2015.

13) Urusan Sosial

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Sosial diukur dengan indikator: Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi, PMKS yang memperoleh bantuan sosial, dan Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Tabel 2.31
Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Jemberana
Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (buah)	19	16	17	17	18
2	PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	35,00	35,00	35,00	35,00	17,79
3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%)	35,00	35,00	35,00	35,00	17,79

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Kesejahteraan sosial dan Transmigrasi Kab. Jemberana Th 2015

14) Urusan Ketenagakerjaan

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Ketenagakerjaan diukur dengan indikator: Angka partisipasi angkatan kerja, Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun, Pencari kerja yang ditempatkan, Tingkat pengangguran terbuka, Keselamatan dan perlindungan, dan Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Tabel 2.32



Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Jemberana Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Angka partisipasi angkatan kerja(%)	77,62	78,34	70,26	72,49	70,90
2	Angka Angkatan Kerja (Orang)	152.237	155,121	140,474	146,400	144.733
3	Angka Kesempatan Kerja(%)	150.042	154.979	137.223	142.086	142.434
4	Pengangguran (orang)	5.368	3.055	4.863	4.314	2.299
5	Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun(kali)	15	10	8	0	0
6	Pencari kerja yang ditempatkan (%)	31,2	35,6	38	40	49
7	Tingkat pengangguran terbuka (%)	3,53	1,97	3,46	2,95	1,59
8	Keselamatan dan perlindungan (%)	82	84	80	80	82
9	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah(%)	1	0	0,5	0,5	1

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Kesejahteraan sosial dan Transmigrasi Kab. Jemberana Th 2015

15) Urusan Koperasi dan UKM

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kopersai dan UKM diukur dengan indikator: Persentase koperasi aktif, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Tabel 2.33
Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Kabupaten Jemberana
Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Persentase koperasi aktif (%)	92,79	91,77	92,15	92,30	92,89
2	Usaha mikro dan kecil (%)	109	102	38	103	105

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Jemberana Th 2015

16) Urusan Penanaman Modal

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Penanaman Modal diukur dengan indikator: Lama proses perizinan dan Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha.

Tabel 2.34



Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Jember Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Lama proses perizinan (hari)	10h	10h	10h	10h	10h
2	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha (buah)	12	12	12	12	-

Sumber: Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Jember Th 2015

17) Urusan Kebudayaan

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kebudayaan diukur dengan indikator: Penyelenggaraan festival seni budaya, Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya, dan Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan.

Tabel 2.35
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Jember
Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Penyelenggaraan festival seni budaya (kali)	8	8	22	24	24
2	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya (kali)	6	6	6	6	6
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	47%	47%	50%	60%	60%

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Jember Th 2015

18) Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kepemudaan dan Olahraga diukur dengan indikator: Jumlah organisasi pemuda, Jumlah organisasi olahraga, Jumlah kegiatan kepemudaan, Jumlah kegiatan olahraga, Gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta) dan lapangan olahraga.

Tabel 2.36
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Jember Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1.	Jumlah Klub Olah raga	5	5	5	5	5
2.	Jumlah Gedung Olah Raga	7	7	7	7	7
3.	Jumlah Organisasi Pemuda	25	22	22	22	22
4.	Jumlah Organisasi Olah raga	13	26	26	26	26
5.	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	8	8	8	8	8
6.	Jumlah Kegiatan Olah raga	1	2	2	2	2

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Jember Th 2015

19) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri



Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diukur dengan indikator: Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu dan persentase ormas yang mendapat pendidikan politik kebangsaan.

Tabel 2.37
Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Kabupaten Jemberana Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu	70	70	70	70	70
2	Persentase Ormas yang mendapat pendidikan politik kebangsaan	70	70	70	70	70

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jemberana Th 2015

20) Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat daerah, kepegawaian dan Persandian diukur dengan indikator: Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk, Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 penduduk, Frekwensi penanganan unjuk rasa, Jumlah/ frekwensi kegiatan pengamanan dalam setahun, Kemiskinan dan Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintahan, dan Penegakkan Perda.

Tabel 2.38
Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Kabupaten Jemberana Tahun 2011-2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Rasio jumlah polisi pamong praja	97	97	97	98	98
2	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 penduduk	62	62	62	62	175
3	Frekwensi penanganan unjuk rasa	1	1	-	-	-
4	Jumlah / frekwensi kegiatan pengamanan dalam setahun	50	49	96	96	96
5	Kemiskinan (KK)	5.935	5.308	4.683	4.049	3.737
6	Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah	1	1	1	1	1
7	Penegakan Perda	120	120	106	435	457
8	Jumlah Ranperda yang diajukan ke DPRD	-	5 Ranperda	5 Ranperda	5 Ranperda	5 Ranperda
9	Jumlah himpunan produk hukum daerah	-	3	3	3	3



	yang terdokumentasikan		Himpunan Produk Hukum Daerah	Himpunan Produk Hukum Daerah	Himpunan Produk Hukum Daerah	Himpunan Produk Hukum Daerah
10	Jumlah kasus yang difasilitasi dalam penyelesaian masalah hukum dan HAM(Kasus)	-	1 Kasus	1 Kasus	0 Kasus	0 Kasus
11	Jumlah kegiatan penyuluhan hukum dan pembinaan desa sadar hukum	-	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan
12	Jumlah kegiatan sosialisasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan	-	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan
13	Jumlah kegiatan pengharmonisasian peraturan perundang-undangan	-	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan

Sumber: Pemerintah Kab. Jemberana Th 2015

21) *Urusan Ketahanan Pangan*

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Ketahanan Pangan diukur dengan indikator: Regulasi ketahanan pangan dan Ketersediaan pangan utama.

Tabel 2.39
Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Jemberana
Tahun 2011-2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Regulasi ketahanan pangan (buah)	4	4	4	4	4
2	Ketersediaan pangan utama (kg)	132.927,48	168.770,00	128.991,73	157.930,60	128.783,04

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Jemberana Th 2015

22) *Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa*

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan indikator: Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dan Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK.

Tabel 2.40



Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Jember Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	10	10	10	10	10
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	51	51	51	51	51

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Jember Th 2015

23) Urusan Statistik

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Statistik diukur dengan indikator: Buku “Kabupaten dalam angka” dan Buku “PDRB Kabupaten”.

Tabel 2.41
Capaian Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Jember
Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Buku “Kabupaten dalam angka” (buah)	1	1	1	1	1
2	Buku “PDRB Kabupaten” (buah)	1	1	1	1	1

Sumber: Bappeda dan PM Kab. Jember Th 2015

24) Urusan Kearsipan

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kearsipan diukur dengan indikator: Pengelolaan arsip secara buku dan jumlah pengelola kearsipan.

Tabel 2.42
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Jember
Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Pengelolaan arsip secara baku (%)	60	100	100	100	100
2	Jumlah pengelola kearsipan	2	2	2	2	2

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Jember Th 2015

25) Urusan Komunikasi dan Informatika



Capaian kinerja layanan umum pada urusan Komunikasi dan informatika diukur dengan indikator: Jumlah jaringan komunikasi, jumlah wartel/warnet terhadap penduduk, Jumlah surat kabar nasional/ lokal, Jumlah penyiaran radio/TV lokal, Webside milik Pemerintah Daerah dan Pameran/Expo.

Tabel 2.43
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Jember Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Jumlah jaringan komunikasi (buah)	4	6	9	9	9
2	Jumlah wartel/warnet terhadap penduduk	0,01	0,16	0,18	0,20	0.20
3	Jumlah surat kabar Nasional /lokal (buah)	15	15	16	16	12
4	Jumlah penyiaran radio/TV lokal (buah)	8	5	5	5	5
5	Webside milik pemerintah daerah (buah)	1	1	1	1	1
6	Pameran/Expo (kali)	1	2	2	2	2

Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Bappeda dan PM Kab. Jember Th 2015

26) Urusan Perpustakaan

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perpustakaan diukur dengan indikator: Meningkatnya jumlah tenaga perpustakaan, Meningkatnya jumlah pengelola Kearsipan dan Meningkatnya Desa dan kelurahan yang cerdas.

Tabel 2.44
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Jember
Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	jumlah tenaga perpustakaan	10	8	10	6	6
2	Rasio jumlah pengunjung perpustakaan	100	100	100	100	100
3	Jumlah Desa dan kelurahan yang cerdas	51	51	51	51	51

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Jember Th 2015

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan



Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan di kabupaten Jemberana dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian.

1) *Urusan Pertanian*

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pertanian diukur dengan indikator: Kontribusi Sektor Peternakan terhadap PDRB (%), Produktivitas Padi ton/Ha dan Produktivitas Sayuran.

Tabel 2.45
Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Jemberana
Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Kontribusi lapangan usaha Peternakan terhadap PDRB (%)	19,02	19,65	20,76	20,88	21,50
2	Produktivitas Padi ton/Ha	5,833	6,558	6,095	6,845	6,674
3	Produktivitas Sayuran Kw/Ha)	44	44	11,10	53,37	53.37
4	Produktifitas Kelapa dalam Kg/Ha	1.160	1.170	1.150	1.180	1.010
5	Produktifitas Kopi Robusta Kg/Ha	270	290	260	280	290
6	Produktifitas Cengkeh Kg/Ha	20	390	240	240	230
7	Produktifitas Kakao Kg/Ha	430	430	630	670	640
8	Produktifitas Panili Kg/Ha	280	300	40	20	0.5

Sumber: Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jemberana tahun 2015

*Hasil dari Perhitungan

2) *Urusan Kehutanan*

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kehutanan diukur dengan indikator; Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Kerusakan kawasan hutan.

Tabel 2.46



Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Kabupaten Jember Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (%)	44,53%	47,85%	63.88%	68,18%	71.82%
2	Kerusakan kawasan hutan(%)	26,63%	26,63%	26,15%	25,42%	24.94%
3	Kawasan Hutan Tetap dikelola oleh Institusi permanen pada Tingkat Tapak (%)	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jember tahun 2015

3) Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Energi Sumber Daya mineral diukur dengan indikator: Persentase pertambangan tanpa ijin, dan persentase kontribusi lapangan usaha pertambangan dan penggalian terhadap PDRB.

Tabel 2.47
Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
Kabupaten Jember Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	% Pertambangan tanpa ijin/ Liar	-	-	-	-	-
2	% Kontribusi lapangan usaha pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	1,01%	1,09	1,10	1,02	0

Sumber: Data BPS Kabupaten Jember

4) Urusan Pariwisata

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pariwisata diukur dengan indikator: Kunjungan wisatawan, dan kontribusi lapangan usaha pariwisata terhadap PDRB.

Tabel 2.48
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Jember
Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Kunjungan wisata (Orang/Tahun)	89.474	98,859	134.093	132.170	156.247
2	Kontribusi lapangan usahapariwisata terhadap PDRB (%)	0,012	0,012	-	-	-

Sumber: Data BPS Kabupaten Jember

5) Urusan Kelautan dan Perikanan



Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perikanan dan Kelautan diukur dengan indikator: Jumlah produksi perikanan, Persentase pencapaian target dan jumlah rata-rata konsumsi ikan.

Tabel 2.49
Capaian Kinerja Urusan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jemberana
Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Jumlah produksi ikan	54.24%	55.65%	31.17%	49.44%	42.07%
2	% Capaian target	84.78	96.28	90.08	92.10	92.89
3	Jumlah rata-rata konsumsi ikan (kg/Tahun)	15,00%	20,00%	25,00%	30,00%	35.00%

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Jemberana Tahun 2015

6) Urusan Perdagangan

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perdagangan diukur dengan indikator: Jumlah produk unggulan daerah yang memenuhi kualifikasi ekspor dan Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informasi.

Tabel 2.50
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Jemberana
Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	% Kontribusi sektor ekonomi/lapangan usaha Perdagangan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang terhadap PDRB	0,11	0,10	0,10	0,09	-
2	Ekspor Bersih Perdagangan	144.229.332.100	1.018.974.000,46	217.166.690.075	1.422.888.965,094	361.128.670.065

Sumber: Data BPS Kabupaten Jemberana

7) Urusan Perindustrian

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perindustrian diukur dengan indikator: Jumlah produk unggulan daerah yang memenuhi kualifikasi ekspor, dan Cakupan bina kelompok pengrajin.

Tabel 2.51



Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Jemberana Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	% Kontribusi lapangan usaha Industri pengolahan terhadap PDRB	4,92%	4,90%	4,99%	5,04	-
2	Pertumbuhan Industri secara keseluruhan (%)	3,30%	1.03%	0.45%	(73.02)%	2.04%

Sumber: BPS Kabupaten Jemberana Tahun 2015

8) Urusan Transmigrasi

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Transmigrasi diukur dengan indikator kinerja: Transmigrasi swakarsa, dan Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB.

Tabel 2.52
Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Jemberana
Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Transmigrasi swakarsa(KK)	0	0	24	0	10
2	Kontribusi Sektor Ekonomi/lapangan usaha transmigrasi terhadap PDRB (%)	0	0	0	0	0

Sumber: BPS Kabupaten Jemberana

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/ kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional.

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

a. Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah ditunjukkan oleh indikator: 1) Angka konsumsi Rumah Tangga; 2) Perbandingan faktor produksi dengan nilai tukar; dan 3) Persentase konsumsi non pangan.

Tabel 2.53



Kemampuan Ekonomi Daerah Kabupaten Jemberana Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Angka konsumsi RT (Rumah Tangga) per kapita	-	-	-	-	-
2	Perbandingan faktor produksi dengan produk yang menggambarkan nilai tukar petani	-	-	-	-	-
3	Persentase konsumsi RT non pangan	-	-	-	-	-

Sumber: BPS Kabupaten Jemberana

b. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Capaian kinerja fokus fasilitas wilayah/ infrastruktur tahun 2005 - 2010 ditunjukkan oleh :1) Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan. 2) jumlah barang/ orang terangkut, dan 3) Jumlah orang/barang terangkut dalam terminal/ pelabuhan.

Tabel 2.54
Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Kabupaten Jemberana
Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	Capaian Kinerja Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	1,15	1,09	1,02	0,97	0,96
2	Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum	2,25	1,76	1,75	1,55	1,17
3	Jumlah Org/ Barang Melalui Dermaga/ Bandara/ Terminal per Tahun	1,47	1,54	1,76	1,82	1,46

Sumber: Dinas PU Kabupaten Jemberana Tahun 2015

c. Fokus Iklim Berinvestasi

Capaian kinerja fokus iklim berinvestasi ditunjukkan oleh: 1) Angka kriminalitas, 2) jumlah demonstrasi, 3) Lama Proses Perijinan, dan 4) Persentase desa berstatus swasembada.

Tabel 2.55



Fokus Iklim Berinvestasi Kabupaten Jemberana Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Angka kriminalitas,	-	-	-	-	-
2	jumlah demo (kali)	-	-	-	-	-
3	Lama Proses Perijinan (hari)	14	14	14	14	14
4	Persentase desa bersertifikat swasembada	-	-	-	-	-

Sumber: Jemberana Dalam Angka

d. Fokus Sumber Daya Manusia

Fokus Sumber Daya Manusia diukur dengan IKK: Rasio Ketergantungan, dan rasio lulusan S-1, S-2, dan S-3 terhadap total penduduk.

Tabel 2.56
Fokus sumberdaya Manusia Kabupaten Jemberana
Tahun 2011 - 2015

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Rasio Ketergantungan	100	100	100	45.09	45.07
2	Rasio lulusan S-1, S-2 dan S-3 terhadap total penduduk	3.28	3.33	3.38	3.34	2.77

Sumber: BKD Kabupaten Jemberana Tahun 2015

2.5 Capaian SPM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Standar Pelayanan Minimal. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuantentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Pelaksanaan SPM terkait dengan Pelayanan dasar. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.

Ada 15 buah SPM yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota yaitu :



1. SPM Bidang Sosial berdasarkan pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
2. SPM Penanaman Modal berdasarkan pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Penanaman Modal Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota,
3. SPM Perhubungan berdasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota,
4. SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang SPM Lingkup Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota,
5. SPM Bidang Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota,
6. SPM Bidang Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota,
7. SPM Bidang Perumahan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 22/Permen/M/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota,
8. SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan,
9. SPM Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera berdasarkan pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor: 55/Hk-010/B5/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera Di Kabupaten/Kota,
10. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14 /Pr/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang,
11. SPM Bidang Pendidikan Dasar berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota,
12. SPM Bidang Kominfo berdasarkan pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22 / Per /M.Kominfo / 12 / 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi Dan Informatika Di Kabupaten/Kota,



13. SPM Bidang Ketenagakerjaan berdasarkan pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.15/Men/X/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan
14. SPM Bidang Ketahanan Pangan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 65/Permentan/Ot.140/12/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Dan Kabupaten/Kota
15. SPM Bidang Kesenian berdasarkan pada Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.106/HK.50/MKP/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian

Capaian SPM masing-masing bidang dapat diuraikan sebagai berikut pada tabel 2.57



Tabel 2.57
Capaian SPM Kabupaten Jember

No	Bidang /Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target rencana pencapaian	Batas waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pendidikan Dasar									
a	Pendidikan Dasar oleh Kab/Kota									
1		Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;	SD		-	-	-	100	100	100
			MI		-	-	-	100	100	100
			SMP		-	-	-	100	100	100
			MTs		-	-	-	100	100	100
2		Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;	SD		-	-	-	53,55	100	100
			MI		-	-	-	11,11	11,11	11,11
			SD		-	-	-	100	100	100
			MI		-	-	-	100	100	100
			SMP		-	-	-	46,15	50	50
			MTS		-	-	-	100	100	100
			SMP		-	-	-	100	100	100
			MTS		-	-	-	100	100	100
3		Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;	SMP		-	-	-	73,07	73,07	73,07
			MTS		-	-	-	50	50	50
			SMP		-	-	-	76,92	76,92	76,92
			MTs		-	-	-	50	50	50
4		Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;	SD		-	-	-	97,26	96,21	96,21
			MI		-	-	-	88,88	88,88	88,88
			SMP		-	-	-	100	100	100
			MTs		-	-	-	100	100	100
			SMP		-	-	-	96,15	96,15	96,15
			MTs		-	-	-	100	100	100
5		Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan	SD		-	-	-	55,73	55,13	55,13
			MI		-	-	-	88,88	88,88	88,88
			SD		-	-	-	55,73	55,13	55,13
			MI		-	-	-	88,89	88,89	88,89



No	Bidang /Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target rencana pencapaian	Batas waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6		Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;			-	-	-			
			SMP		-	-	-	73,08	73,08	73,08
			MTs		-	-	-	50	50	50
7		Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	SD		-	-	-	9,28	9,189	9,19
			MI		-	-	-	88,89	88,89	88,89
			SD		-	-	-	96,72	95,68	95,68
			MI		-	-	-	88,89	88,89	88,89
8		Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%	SMP		-	-	-	100	100	100
			MTS		-	-	-	50	50	50
			SMP		-	-	-	100	100	100
			MTs		-	-	-	50	50	50
9		Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn			-	-	-			
			SMP		-	-	-	80,77	80,77	80,77
			MTs		-	-	-	50	50	50
10		Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	SD		-	-	-	97,3	97,30	97,30
			MI		-	-	-	88,89	88,89	88,89
11		Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;			-	-	-			
			SMP		-	-	-	96,15	96,15	96,15
			MTs		-	-	-	50	50	50
12		Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik	SD		-	-	-	100	100	100
			MI		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
13		Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;	SD		-	-	-	-	-	-
			MI		-	-	-	-	-	-
			SMP		-	-	-	-	-	-
			MTs		-	-	-	-	-	-
		100 bila kab/ kota memiliki rencana dan telah melaksanakan kegiatan untuk membantu sekolah			-	-	-	-	-	-



No	Bidang /Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target rencana pencapaian	Batas waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif								
		50 bila memiliki rencana tetapi belum melaksanakan			-	-	-	-	-	-
		0 bila tidak memiliki rencana untuk membantu sekolah dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.			-	-	-	-	-	-
14		Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan;	SD		-	-	-	33,88	43,24	43,24
			MI		-	-	-	44,44	44,44	44,44
			SMP		-	-	-	53,85	69,23	69,23
			MTs		-	-	-	37,5	50	50
b	Pendidikan dasar oleh satuan pendidikan									
1.		Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	SD		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
			MI		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
			SD		-	-	-	47,00	51,89	51,89
			MI		-	-	-	22,22	22,22	22,22
2		Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;	SMP		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
			MTs		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
			SMP		-	-	-	92,31	92,31	92,31
			MTs		-	-	-	50	50	50
3		Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;	SD		-	-	-	59,561	58,92	58,92
			MI		-	-	-	33,33	33,33	33,33
4		Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;	SD		-	-	-	46,99	46,49	46,49
			MI		-	-	-	33,33	33,33	33,33
			SMP		-	-	-	88,46	88,46	88,46
			MTs		-	-	-	50	50	50
5		Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;	guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan		-	-	-	36,35	36,35	36,35



No	Bidang /Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target rencana pencapaian	Batas waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			SD		-	-	-	40,44	40	40
			MI		-	-	-	44,44	44,44	44,44
			SMP		-	-	-	30,77	30,77	30,77
			MTs		-	-	-	37,5	37,5	37,5
6		Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut :	Jumlah rombongan belajar yang memenuhi standar		-	-	-	56,72	56,72	56,712
		Kelas I - II : 18 jam per minggu	SD		-	-	-	100	100	100
		Kelas III : 24 jam per minggu	MI		-	-	-	100	100	100
		Kelas IV – VI : 27 jam per minggu	SMP		-	-	-	100	100	100
		Kelas VII – IX : 27 jam per minggu	MTs		-	-	-	100	100	100
7		Setiap satuan pendidikan menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku	SD		-	-	-	100	100	100
			MI		-	-	-	100	100	100
			SMP		-	-	-	100	100	100
			MTs		-	-	-	100	100	100
8		Setiap guru yang menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya	SD		-	-	-	100	100	100
			MI		-	-	-	100	100	100
			SMP		-	-	-	100	100	100
			MTs		-	-	-	100	100	100
9		Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	Jumlah guru yang mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik		-	-	-	96,37	96,37	96,37
			SD		-	-	-	95,63	83,74	83,74



No	Bidang /Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target rencana penca paian	Batas waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			MI		-	-	-	100	100	100
			SMP		-	-	-	88,46	88,46	100
			MTs		-	-	-	100	88,46	100
10		Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	SD		-	-	-	83,06	68,65	68,65
			MI		-	-	-	66,67	66,67	66,67
			SMP		-	-	-	80,77	80,77	80,77
			MTs		-	-	-	75	75	75
11		Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil presentasi belajar peserta didik	SD		-	-	-	100	100	100
			MI		-	-	-	100	100	100
			SMP		-	-	-	100	100	100
			MTs		-	-	-	100	100	100
12		Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau	Jumlah satuan pendidikan yang menyampai kan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN)		-	-	-	100	100	100
			SD		-	-	-	100	100	100
			MI		-	-	-	100	100	100
			SMP		-	-	-	100	100	100
			MTs		-	-	-	100	100	100
13		Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)	SD		-	-	-	-	-	-
			MI		-	-	-	-	-	-
			SMP		-	-	-	-	-	-



No	Bidang /Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target rencana pencapaian	Batas waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			MTs		-	-	-	-	-	-

2	Kesehatan									
1)		Kunjungan Bumil K4	95%	2015	89,64	93,23	90,68	92,17	98,32	40,27
2)		Komplikasi Kebidanan yang ditangani	80%	2015	100,00	100,00	100,00	80,24	80,42	29,69
3)		Persalinan Ditolong Nakes yg memiliki Kompetensi Kebidanan	90%	2015	90,92	103,14	99,40	94,95	103,03	44,84
4)		Pelayanan Nifas.	90%	2015	99,10	98,57	96,54	100,00	99,17	40,99
5)		Neonatus dengan Komplikasi yg ditangani	80%	2010	101,46	100,00	100,00	80,24	80,03	45,85
6)		Kunjungan Bayi	90%	2010	99,83	100,00	94,85	100,05	99,26	45,82
7)		Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%	2010	96,03	100,00	78,43	100,00	100,00	100,00
8)		Pelayanan Anak Balita	90%	2010	67,02	91,71	86,69	78,61	91,51	34,80
9)		Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6 – 24 bulan Keluarga Miskin	100%	2010	0,00	0,00	0,00	100,00	#DIV/0!	100,00
10)		Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan	100%	2010	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
11)		Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan setingkat	100%	2010	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
12)		Peserta KB Aktif	70%	2010	100,00	88,74	88,81	87,90	85,46	85,68
13)		Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit - Acute Flacid Paralysis (AFP)	≥2/100.000	Pertahun	0,00	1,27	0,00	3,93	86,80	89,74
14)		Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit - Penemuan Penderita Pneumonia Balita	100%	2010	100,00	100,00	100,00	0,52	1,20	3,08
15)		Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit - Penemuan Pasien baru TB BTA Positif.	100%	2010	100,00	100,00	100,00	60,91	65,91	55,81
16)		Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit - Penderita DBD yang ditangani	100%	2010	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17)		Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit - Penemuan Penderita Diare	100%	2010	100,00	100,00	100,00	89,74	92,69	41,60
18)		Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin	100%	2015	100,00	100,00	100,00	46,26	4,16	30,66
19)		Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	100%	2015	100,00	100,00	100,00	0,11	4,16	30,66
20)		Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kab/Kota	100%	2015	100,00	100,00	100,00	100,00	82,35	33,33



No	Bidang /Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target rencana pencapaian	Batas waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21)		Desa / Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam.	100%	2015	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22)		Desa Siaga Aktif	100%	2015	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
a.	Penyediaan air minum									
1)		persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	% penduduk	-	-	-	-	-	98,81	99,01
b	Penyediaan sanitasi									
1)		persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	% penduduk	-	-	-	-	-	98,09	98,29
2)		persentase pengurangan sampah perkotaan	% penduduk	-	-	-	-	-	80,22	80,38
3)		persentase pengangkutan sampah	% penduduk	-	-	-	-	-	32,7	33,03
4)		persentase pengoperasian TPA	% pengoperasian TPA	-	-	-	-	-	79,57	79,73
5)		persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun	% penduduk	-	-	-	-	-	83,42	83,59
c	Penataan Bangunan dan Lingkungan								80,02	80,18
1)		persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IM) yang diterbitkan	IMB	-	-	-	-	-	26,19	26,24
d	Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan									
2)		persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Ha	-	-	-	-	-	-	-

4	Perumahan Rakyat									
a.	Rumah Layak Huni dan Terjangkau									
1)		Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100%	2009 - 2025	-	-	-	-	-	-
2)		Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	70 %	2009 - 2025	-	-	-	-	-	-
b.	Lingkungan yang Sehat									



No	Bidang /Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target rencana penca paian	Batas waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dan Aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)									
1)		Cakupan lingkungan yg sehat dan aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100%	2009 - 2025	-	-	-	-	-	-

5	Pemerintahan Dalam Negeri									
a	Pelayanan Dokumen Kependudukan									
1)		Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	100%	2015	-	-	-	-	94,54	95,06
2)		Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	100%	2015	-	-	-	-	80,77	83,767
3)		Cakupan Penerbitan Kuitipan Akta Kelahiran	90%	2020	-	-	-	-	28,78	29,50
4)		Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	70%	2020	-	-	-	-	70,57	45,10
b.	Pemeliharaan Keten-traman & Ketertiban Masyarakat									
1)		Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten/Kota	100%	2015	-	-	-	-	100	100
2)		Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	3 x patrol dlm sehari	2014	-	-	-	-	9.2	72.0
3)		Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten / kota	1 org setiap RT atau sebutan lainnya	2014	-	-	-	-	9.0	9.0
c.	Penanggulangan Bencana Kebakaran									
1)		Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten/Kota	80%	2015	-	-	-	-	47.66	39.72
2)		Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	75%	2015	-	-	-	-	100	100
3)		Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	85%	2015	-	-	-	-	0	0
4)		Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)	90%	2015	-	-	-	-	80	80

6	Sosial
----------	---------------



No	Bidang /Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target rencana penca paian	Batas waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a.	Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial:									
1)		Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Kabupaten/ Kota	80%	2008-2015	-	-	-	-	1.23	0.00
2)		Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten/Kota	80%	2008-2015	-	-	-	-	-	-
b	Penyediaan sarana dan prasarana sosial				-	-	-	-	100.00	100.00
1)		Penyediaan sarana prasarana pantai sosial skala kabupaten/kota	80%	2008-2015	-	-	-	-	-	-
2)		Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala Kabupaten/Kota	60%	2008-2015	-	-	-	-	-	-
c.	Penanggulangan korban Bencana:				-	-	-	-	79.51	70.00
1)		Bantuan sosial bagi korban bencana skala Kabupaten/Kota	80%	2008-2015	-	-	-	-	-	-
2)		Evakuasi korban bencana skala Kabupaten/kota	80%	2008-2015	-	-	-	-	-	-
d.	Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial:				-	-	-	-	9.29	81.10
1)		Penyelenggaraan jaminan sosial skala Kabupaten/Kota	40%	2008-2015	-	-	-	-	14.19	15.38
7	Penanaman Modal									
a	Kebijakan Penanaman Modal									
1)		Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan sampai dengan 2014 sekurang-kurangnya 1 (satu) sektor/bidang usaha pertahun :	1 (satu) sektor/ bidang usaha/ tahun	2014	-	-	-	-	5 Sektor	5 Sektor
b	Kerjasama Penanaman Modal									
1)		Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	1 (satu)	2014	-	-	-	-	0 kali	0 kali



No	Bidang /Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target rencana penca paian	Batas waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(UMKMK) tingkat propinsi dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional	kali/ tahun							
2)		Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat kabupaten/kota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional	1 (satu) kali/ tahun	2014	-	-	-	-	1 kali	2 kali
c	Promosi Penanaman Modal									
1)		Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal ditingkat provinsi.	1 (satu) kali/ tahun	2014	-	-	-	-	3 kali	2 kali
2)		Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal ditingkat kabupaten/kota.	1 (satu) kali/ tahun	2014	-	-	-	-	0 kali	0 kali
d	Pelayanan Penanaman Modal									
1)		Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota, sesuai kewenangan pemerintah provinsi.	100%	2014	-	-	-	-	-	-
2)		Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota, sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota.	100%	2014	-	-	-	-	-	-
e	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal									
1)		Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha.	1 (satu) kali/ tahun	2014	-	-	-	-	100%	100%
f	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal									
1)		Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi	100%	2014	-	-	-	-	1	1



No	Bidang /Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target rencana pencapaian	Batas waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).								
g	Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal.									
1)		Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) kali/ tahun	2014	-	-	-	-	0 kali	0 kali
8	Perhubungan									
a	Angkutan Jalan									
1)		Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	75%	2014	100,64	104,40	104,40	99,35760	102,1739	104,3956
2)		Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota.	60%	2014	98,37	98,11	103,77	98,1132075	101,8868	103,7736
3)		Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	100%	2014	54,55	83,33	137,14	45,45455	54,54545	54,54545
4)		Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	40%	2014	100	100	100	100	100	100
5)		Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.	60%	2014	84,2739	94,0857	94,8000	82,2286	82,6571	84,0857
6)		Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	60%	2014	100	100	100	100	100	100
7)		Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.	50%	2014	100	100	100	85	100	100
8)		Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.	100%	2014	20	20	30	30	20	20



No	Bidang /Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target rencana penca paian	Batas waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9)		Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.	40%	2014	16,6667	16,6667	16,66667	16,6667	16,6666	16,66667
10)		Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	100%	2014	0	0	0	0	0	0
11)		Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.	100%	2014	91	91	58,91892	91	47,0219	58,91892
B	Angkutan Sungai dan Danau.									
1)		Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari.	75%	2014	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2)		Tersedianya kapal sungai dan danau yang melayani trayek dalam Kabupaten/Kota yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari.	40%	2014	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3)		Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau.	60%	2014	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4)		Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam satu Kabupaten/Kota.	100%	2014	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
5)		Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau untuk daerah yang telah melayani angkutan sungai dan danau.	50%	2014	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c.	Angkutan Penyeberangan									
1)		Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota.	60%	2014	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
2)		Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi	100%	2014	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!



No	Bidang /Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target rencana pencapaian	Batas waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		pada lintas dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten/Kota.								
3)		Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/ Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran.	60%	2014	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
4)		Terpenuhinya standar keselamatan kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/ Kota	100%	2014	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
5)		Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota	50%	2014	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
d.	Angkutan Laut									
1)		Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	90%	2014	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
2)		Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	100%	2014	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
3)		Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	60%	2014	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
4)		Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota.	100%	2014	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
5)		Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang	100%	2014	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!



No	Bidang /Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target rencana pencapaian	Batas waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT								

9	Lingkungan Hidup									
a.	Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air									
1)		Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	100%	2013	40%	60%	80%	80%	100%	80,40%
b	Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak									
1)		Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber yang tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	100%	2013	20%	20%	40%	40%	80%	100%
c.	Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau tanah untuk produksi Biomassa									
1)		Prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	100%	2013	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	0%	36%
d	Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup									
1)		Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	2013	80%	85%	82%	100%	100%	100%

10	Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan									
a.	Penanganan Pengaduan/									



No	Bidang /Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target rencana pencapaian	Batas waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Laporan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak									
1)		Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%	2014	-	-	100	100	100	100
b.	Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan									
1)		Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS	100%	2014	-	-	-	-	-	-
c.	Rehabilitasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan									
1)		Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	75%	2014	-	-	-	-	-	-
2)		Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Dierikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	75%	2014	-	-	100	100	100	100
d.	Penegakan dan Bantuan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan									
1)		Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	80%	2014	-	-	100	100	100	100
2)		Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	50%	2014	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0
e.	Pemulangan dan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan									



No	Bidang /Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target rencana pencapaian	Batas waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1)		Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	50%	2014	-	-	-	49	26	51
2)		Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	100%	2014	-	-	-	-	-	-

11	Keluarga Berencana									
a.	Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)									
1)		Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (3,5%)	100	2014	-	-	1,87	1,87%	1,20%	1,20%
2)		Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (65%)	100	2014	-	-	88,78	88,73%	88,81%	88,62%
3)		Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpe-nuhi (unmet need) 5%	100	2014	-	-	2,28	2,37%	2,29%	2,36%
4)		Cakupan Anggota Bina Keluar-ga Balita (BKB) ber-KB (70%)	100	2014	-	-	80,20	80,20%	92,20%	92,62%
5)		Cakupan PUS peserta KB Ang-gota Usaha Peningkatan Pen-dapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (87%)	100	2014	-	-	87,46	87,89%	30,13%	87,89%
6)		Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/ PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan	100	2014	-	-	1,34	1,34%	1,70%	1,75%
7)		Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/ kelurahan	100	2014	-	-	1	1	1	1
b.	Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi									
1)		Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	100	2014	-	-	100	100	100	100
c.	Penyediaan Informasi Data Mikro									
1)		Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun	100	2014	-	-	100	110,04	110	113

12	Komunikasi dan Informatika									
a.	Pelaksanaan Diseminasi									



No	Bidang /Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target rencana penca paian	Batas waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Informasi Nasional									
1)		Media massa seperti majalah, radio, dan televisi;	12 x /tahun	2014						
		- Media Cetak			-	-	400%	400%	400%	0
		- Radio			-	-	117%	117%	117%	0
		- Televisi			-	-	17%	17%	17%	0
2)		Media baru seperti website (media online);	Setiap hari	2014	-	-	0	0	0	3000
3)		Media tradisional seperti pertunjukan rakyat;	12 x /tahun	2014	-	-	-	-	-	16,66
4)		Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/ diskusi dan lokakarya;	12 x /tahun setiap kecamatan	2014	-	-	1100%	1100%	2200%	0
5)		Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho	12 x /tahun	2014	-	-	100%	100%	100%	833,33
		- Buletin			-	-	-	-	-	0
		- Leaflet			-	-	-	-	-	0
		- Booklet			-	-	-	-	-	0
		- Brosur			-	-	400%	400%	400%	8333,33
		- Spanduk			-	-	117%	117%	117%	1325
		- Baliho			-	-	17%	17%	17%	725
b.	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)									
1)		Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	50%	2014			100%	0	0	0
13	Ketenagakerjaan									
a.	Pelayanan Pelatihan Kerja									
1)		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	75%	2016	-	-	-	#DIV/0!	92%	97%
2)		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	60%	2016	-	-	-	#DIV/0!	93%	78%
3)		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	60%	2016	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
b.	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja									
1)		Besaran pencari kerja yang terdaftar yang	70%	2016	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	47%



No	Bidang /Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target rencana penca paian	Batas waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ditempatkan								
c.	Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial									
1)		Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	50%	2016	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	100%
d.	Pelayanan Kepesertaan Jamsostek									
1)		Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek	50%	2016	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
e.	Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan									
1)		Besaran pemeriksaan perusahaan	45%	2016	-	-	-	#DIV/0!	13%	37%
2)		Besaran pengujian peralatan di perusahaan	50%	2016	-	-	-	#DIV/0!	14%	20%

14	Ketahanan Pangan									
a.	Ketersediaan dan Cadangan Pangan									
1)		Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita	90%	2015	-	-	-	225,30	101,72	101,91
2)		Penguatan Cadangan Pangan	60%	2015	-	-	-	108,00	93,00	103,00
b.	Distribusi dan Akses Pangan									
1)		Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	90%	2015	-	-	-	300,00	300,00	300,00
2)		Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	90%	2015	-	-	-	100,00	100,00	100,00
c.	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan									
1)		Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90%	2015	-	-	-	90,60	72,30	71,80
2)		Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	80%	2015	-	-	-	0,00	0,00	0,00
d.	Penanganan Kerawanan Pangan									
1)		Penanganan Daerah Rawan Pangan	60%	2015	-	-	-	0,00	0,00	0,00

15	Kesenian									
a.	Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian									



No	Bidang /Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target rencana pencapaian	Batas waktu Pencapaian	Realisasi Pencapaian Target					
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1)		Cakupan Kajian Seni (50%)	100%	2014	-	-	-	-	80	93
2)		Cakupan Fasilitas Seni (30%)	100%	2014	-	-	-	-	0	0
3)		Cakupan Gelar Seni (75%)	100%	2014	-	-	-	-	800	800
4)		Misi Kesenian	100%	2014	-	-	-	-	300	300
b.	Sarana dan Prasarana									
1)		Cakupan Sumberdaya Manusia Kesenian (25%)	100%	2014	-	-	-	-	1600	1750
2)		Cakupan Tempat (100%)	100%	2014	-	-	-	-	300	300
3)		Cakupan Organisasi	100%	2014	-	-	-	-	196,08	196,08



2.6 Analisis Capaian Kinerja

Hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terkait dengan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota dapat dirangkum dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.58
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jemberana
Tahun 2011-2015

No	Aspek /focus/urutan/indikator kinerja pembangunan daerah	Tahun					Standar	Interpretasi
		2011	2012	2013	2014	2015*)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Aspek Kesejahteraan Masyarakat							
1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.1	Pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku (juta rupiah)	11,12	10,76	11,43	16,09			
1.1.1	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	1,416,013.56	1,514,157.38	1,648,866.20	1,850,134.16			
1.1.2	Pertambangan dan Penggalian	63,362.61	74,071.90	82,867.51	91,863.41			
1.1.3	Industri pengolahan	311,124.04	341,071.05	380,969.86	442,429.48			
1.1.4	Pengadaan Listrik dan Gas	7,035.33	6,798.65	6,540.49	8,497.22			
1.1.5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan daur Ulang	6,986.86	7,053.10	804,388.29	862,256.34			
1.1.6	Konstruksi	588,338.92	736,072.09	804,388.29	862,256.34			
1.1.7	Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi Mobil dan Sepeda Motor	655,215.85	698,796.83	769,395.78	889,811.51			
1.1.8	Transportasi dan Pergudangan	937,357.59	1,063,822.46	1,241,712.56	1,538,797.83			
1.1.9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	813,462.50	920,075.42	1,074,369.78	1,327,112.04			
1.1.10	Informasi dan Komunikasi	393,047.53	418,169.64	434,260.11	480,745.96			
1.1.11	Jasa Keuangan dan Asuransi	182,969.19	214,001.42	249,709.27	288,916.20			
1.1.12	Real Estat	348,353.05	371,324.54	409,692.38	470,073.35			
1.1.13	Jasa Perusahaan	47,122.43	49,971.34	55,333.59	63,641.28			
1.1.14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	202,750.10	203,087.55	202,577.67	232,312.15			
1.1.15	Jasa Pendidikan	120,289.84	125,427.42	150,923.03	175,146.52			
1.1.16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	115,963.24	126,138.17	146,541.10	169,890.17			
1.1.17	Jasa Lainnya	86,139.93	92,910.73	104,284.79	119,900.84			
	Total	6,295,532.55	6,972,949.70	7,769,853.83	9,019,716.82			
1.2	Pertumbuhan Ekonomi	5,89	6,11	5,69	6,05			
1.3	Laju Inflasi	5,90	5,38	5,88	5,36			
1.4	PDRB Perkapita	23,810,637.50	26,194,401.57	28,991,991.88	33,431,122.40			



No	Aspek /focus/urutan/indikator kinerja pembangunan daerah	Tahun					Standar	Interpretasi
		2011	2012	2013	2014	2015*)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5	Indeks Gini	0,4020	0,3706	0,3710	0,3863			
2	Fokus Kesejahteraan Sosial							
2.1	Pendidikan							
2.1.1	Angka Melek Huruf (%)	90,69	91,36	92,65	96,12	-		
2.1.2	Angka Rata-rata lama sekolah (Th)	7,80	7,80	7,87	7,87	7,3		
2.1.3	APK SD/MI/Paket A (%)	113,94	113,95	108,75	106,46	107,34		
2.1.4	APK SMP/MTs/Paket B (%)	116,98	117,01	119,85	128,83	131,83		
2.1.5	APK SMA/SMK/MA/Paket C (%)	98,07	98,21	98,71	114,75	123,54		
2.1.6	APM SD/MI/Paket A (%)	98,43	98,71	96,28	93,09	94,50		
2.1.7	APM SMP/MTs/Paket B (%)	93,85	93,97	99,12	98,74	99,55		
2.1.8	APM SMA/SMK/MA/Paket C (%)	74,96	86,03	89,10	82,87	86,14		
2.2	Kesehatan							
2.2.1	Angka kematian bayi	9,16	10,63	6,93	7,5	8,20		
2.2.2	Angka Usia Harapan Hidup (Th)	71,8	71,8	71,8	71,8	71,8		
2.2.3	Angka Kematian Balita (%)	14,52	11,47	6,70	8,77	7,5		
2.2.4	Angka Kematian Ibu /100.000 KH	93,60	125,10	69,09	42,8	145,7		
2.3	Pertanahan							
2.3.1	Persentase Penduduk yang Memiliki Lahan	62%	62%	50,40%	60%	60%		
2.4	Ketanagakerjaan.							
2.4.1	Tingkat Partisipasi Angkatan kerja	77,62	78,34	70,26	72,49	70,90		
3	Fokus Seni Budaya dan Olahraga							
3.1	Kebudayaan							
3.1.1	Jumlah Group Kesenian per 10.000 pdd	491	491	495	556	556		
3.1.2	Gedung Kesenian.	2	2	4	4	4		
3.2	Kinerja Pemuda dan Olahraga							
3.2.1	Jumlah Klub Olahraga Kesenian per 10.000	5	5	5	5	5		
3.2.2	Jumlah Gedung Olahraga per 10.000	7	7	7	7	7		
B.	Aspek Pelayanan Umum							
1	Fokus Layanan Urusan Wajib							
1.1	Pendidikan							
1.1.1	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	98,50	98,53	98,94	93,09	106,57	98,50	
1.1.2	Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI	1:135	1:135	1:135	1:135	1:133	1:135	
1.1.3	Rasio ketersediaan sekolah perpenduduk	1:364	1:341	1:320	1:317	1:308	1:364	



No	Aspek /focus/urutan/indikator kinerja pembangunan daerah	Tahun					Standar	Interpretasi
		2011	2012	2013	2014	2015*)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	usia sekolah SMP/MTs							
1.1.4	Rasio ketersediaan sekolah SMA	1:669	1:662	1:628	1:585	1:352	1:669	
1.1.5	Rasio guru: murid.SD/MI	1/19	1/19	1/19	1/19	1:17	1/19	
1.1.6	Rasio guru: murid.SMA/MA	1/21,7	1/13	1/13	1/13	1:13	1/21,7	
1.1.7	Rasio guru: murid.per kelas rata-rata SD/MI	1/1,3	1/1,2	1/9	1/9	1:9	1/1,3	
1.1.8	Rasio guru: per kelas rata-rata murid.SMP/MTs	1/1,3	1/2	1/1,4	1/1,4	1:14	1/1,3	
1.1.9	Rasio guru: per kelas rata-rata murid.SMA/MA	1/1,3	1/2	1/1,3	1/2,8	1:3	1/1,3	
1.2	Kesehatan							
1.2.1	Angka Kematian Ibu	93,60	125,10	69,09	42,8	145,7		
1.2.2	Angka Kematian Bayi	9,16	10,63	6,93	7,5	5,8		
1.2.3	Angka Kematian Balita	14,52	11,47	6,70	8,77	7,5		
1.2.4	Gizi Buruk	0,01	0,44	0,41	0,05	0,03		
1.2.5	Usia Harapan Hidup	71,8	71,8	71,8	71,8	71,8		
1.2.6	Rasio Posyandu per Satuan 100 Balita	-	2,63	2,59	1,59	2		
1.2.7	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 10.000 penduduk	4,55	4,55	4,55	2	2		
1.2.8	Rasio Rumah Sakit per 100.000 Penduduk	1,30	1,30	1,30	1,11	1,11		
1.2.9	Rasio Dokter per 100.000 Penduduk	25,21	27,66	33,16	34,84	27,98		
1.2.10	Rasio Bidan per 100.000 Penduduk	40,52	71,34	111,70	174,39	12,43		
1.2.11	Rasio perawat per 100.000 Penduduk	-	-	-	71,53	2,21		
1.2.12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	103,14	99,40	94,95	80,4	91,04		
1.2.13	Cakupan desa kelurahan UCI	100%	100%	100%	100%	100%		
1.2.14	Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100 %		
1.2.15	Angka Kesakitan	18,10	14,36	13,10	29,8	56,78		
1.3	Pekerjaan Umum							
1.3.1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik (%)	82,98	84,14	89,14	94,14	96		
1.3.2	Rasio Jaringan Irigasi (m/ha)	66	72	80,80	89,60	64,14		
1.3.3	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	85,67	92,39	92,39	76	91,76		
1.4	Perumahan							
1.4.1	Rumah tangga pengguna air bersih (%)	94,51	96,61	91,54	91	57,77		



No	Aspek /focus/urutan/indikator kinerja pembangunan daerah	Tahun					Standar	Interpretasi
		2011	2012	2013	2014	2015*)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4.2	Rumah tangga pengguna listrik	72	-	-	-	-		
1.4.3	Rumah tangga bersanitasi (%)	93,29	94,69	92,69	76	68,76		
1.4.4	Rumah layak huni (%)	91,99	92,39	92,39	83,01	93,11		
1.5	Penataan Ruang							
1.5.1	Rasio ruang terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (%)	25	25	25	44	44		
1.5.2	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan (%)	25,8	22,9	26,34	30			
1.6	Perencanaan Pembangunan Daerah							
1.6.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	1	1	1	1	1		
1.6.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	1	1	1	1	1		
1.6.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	5	5	5	5	5		
1.6.4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	100	100	100	100	100		
1.7	Urusan Perhubungan							
1.7.1	Arus penumpang angkutan umum (%)	48,58%	49,16%	53,01%	49,17%	64,59%		
1.7.2	rasio ljin trayek(%)	33,47%	22,04%	6,53%	24,08%	18,78%		
1.7.3	Jumlah uji kir angkutan umum (kali)	2428	3050	3280	3562	3712		
1.7.4	Jumlah Pelabuhan Laut /udara/Terminal Bis.	2	2	2	2	2		
1.8.	Lingkungan Hidup							
1.8.1	Persentase penanganan sampah	77,22	77,35	77,50	77,58	77,78		
1.8.2	Pengelolaan kualitas air (% penetapan kelas air)	1	2	2	2	8		
1.8.3	Cakupan pengawasan terhadap dokumen lingkungan	100	100	100	100	100		
1.8.4	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	32	32	36	36	28		
1.8.5	Pengakuan hukum lingkungan	100	100	100	100	100		
1.9	Urusan Pertanahan							
1.9.1	Persentase luas lahan bersertifikat	47,09%	47,09%	62,05%	64,92%	64,93%		
1.9.2	Penyelesaian kasus tanah negara	100%	100%	100%	100%	100%		
1.9.3	Penyelesaian izin	100%	100%	100%	100%	100%		



No	Aspek /focus/urutan/indikator kinerja pembangunan daerah	Tahun					Standar	Interpretasi
		2011	2012	2013	2014	2015*)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	lokasi							
1.10	Kependudukan dan Catatan Sipil							
1.10.1	% kepemilikan KTP	81,08	82,70	83,45	84,56	89,68		
1.10.2	% kepemilikan akta kelahiran	19,10	25,12	28,78	30,61	32,81		
1.11	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
1.11.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	2,25	3,24	3,25	3,57	3,57		
1.11.2	Rasio KDRT	14	49	46	9	21		
1.11.3	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	0,03	-	-	-	-		
1.11.4	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100	100	100	100	100		
1.12	Urusan Keluarga berencana dan keluarga sejahtera							
1.12.1	Rata – rata jumlah anak per keluarga	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8		
1.12.2	Rasio akseptor KB	88,74	88,81	88,25	85,45	88,74		
1.12.3	Cakupan peserta KB aktif	88,74	88,81	88,25	85,45	88,74		
1.12.4	Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I	7,77	8,49	8,54	13,22	7,77		
1.13	Urusan Sosial							
1.13.1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	19	16	17	17	18		
1.13.2	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	35,00	35,00	35,00	35,00	50		
1.13.3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	35,00	35,00	35,00	35,00	50		
1.14	Urusan Ketenagakerjaan							
1.14.1	Angka partisipasi angkatan kerja(%)	77,62	78,34	70,26	72,49	70,90		
1.14.2	Angka Angkatan Kerja (Orang)	152.237	155,121	140,474	146,400	144.733		
1.14.3	Angka Kesempatan Kerja(%)	150.042	154.979	137.223	142.086	142.434		
1.14.4	Pengangguran (orang)	5.368	3.055	4.863	4.314	2.299		
1.14.5	Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun(kali)	15	10	8	0	0		
1.14.6	Pencari kerja yang ditempatkan (%)	31,2	35,6	38	40	49		
1.14.7	Tingkat pengangguran terbuka (%)	3,53	1,97	3,46	2,95	1,59		
1.14.8	Keselamatan dan perlindungan (%)	82	84	80	80	82		
1.14.9	Perselisihan buruh dan	1	0	0,5	0,5	1		



No	Aspek /focus/urutan/indikator kinerja pembangunan daerah	Tahun					Standar	Interpretasi
		2011	2012	2013	2014	2015*)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah(%)							
1.15	Urusan Koperasi dan UKM							
1.15.1	Persentase koperasi aktif	92,79	91,77	92,15	92,30	92.89		
1.15.2	Usaha mikro dan kecil	109	102	38	103	105		
1.16	Urusan Penanaman Modal							
1.16.1	Lama proses perizinan	10h	10h	10h	10h	10h		
1.16.2	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	12	12	12	12	12		
1.17	Urusan Kebudayaan							
1.17.1	Penyelenggaraan festival seni budaya	8	8	22	24	24		
1.17.2	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	6	6	6	6	6		
1.17.3	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	47%	47%	50%	60%	60%		
1.18	Urusan Kepemudaan dan Olahraga							
1.18.1	Jumlah Klub Olah raga	5	5	5	5	5		
	Jumlah Gedung Olah Raga	7	7	7	7	7		
1.18.2	Jumlah Organisasi Pemuda	25	22	22	22	22		
1.18.3	Jumlah Organisasi Olah raga	13	26	26	26	26		
1.18.4	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	8	8	8	8	8		
1.18.5	Jumlah Kegiatan Olah raga	1	2	2	2	2		
1.19	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri							
1.19.1	Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah	1	1	1	1	1		
1.19.2	Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	-	-	-	-	-		
1.20	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat daerah, kepegawaian dan Persandian							
1.20.1	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	97	97	97	98	98		
1.20.2	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 penduduk	62	62	62	1.663	1.663		
1.20.3	Frekwensi penanganan unjuk rasa	1	1	-	-	-		
1.20.4	Jumlah / frekwensi kegiatan pengamanan dalam setahun	50	49	96	96	96		
1.20.5	Kemiskinan	5.935	5.308	4.683	4.049	3.737		



No	Aspek /focus/urutan/indikator kinerja pembangunan daerah	Tahun					Standar	Interpretasi
		2011	2012	2013	2014	2015*)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.6	Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah	1	1	1	1	1		
1.20.7	Penegakan Perda	120	120	106	435	457		
1.20.8	Jumlah Ranperda yang diajukan ke DPRD	-	5 Ranperda	5 Ranperda	5 Ranperda	5 Ranperda		
1.20.9	Jumlah himpunan produk hukum daerah yang terdokumentasikan	-	3 Himpunan Produk Hukum Daerah	3 Himpunan Produk Hukum Daerah	3 Himpunan Produk Hukum Daerah	3 Himpunan Produk Hukum Daerah		
1.20.10	Jumlah kasus yang difasilitasi dalam penyelesaian masalah hukum dan HAM	-	1 Kasus	1 Kasus	1 Kasus	1 Kasus		
1.20.11	Jumlah kegiatan penyuluhan hukum dan pembinaan desa sadar hukum	-	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan		
1.20.12	Jumlah kegiatan sosialisasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan	-	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan		
1.20.13	Jumlah kegiatan pengharmonisasian peraturan perundang-undangan	-	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan		
1.21	Urusan Ketahanan Pangan							
1.21.1	Regulasi ketahanan pangan	4	4	4	4	4		
1.21.2	Ketersediaan pangan utama	132.927,48	168.770,00	128.991,73	157.930,60	128.783,04		
1.22	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa							
1.22.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	10	10	10	10	10		
1.22.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	51	51	51	51	51		
1.23	Urusan Statistik							
1.23.1	Buku "Kabupaten dalam angka"	1	1	1	1	1		
1.23.2	Buku "PDRB Kabupaten"	1	1	1	1	1		
1.24	Urusan Kearsipan							
1.24.1	Pengelolaan arsip secara baku	60	100	100	100	100		
1.24.2	jumlah pengelola Kearsipan	2	2	2	2	2		
1.25	Urusan Komunikasi dan Informatika							
1.25.1	Jumlah jaringan komunikasi	4	6	9	9	9		
1.25.2	Jumlah wartel/warnet terhadap	0,01	0,16	0,18	0,20	0,20		



No	Aspek /focus/urutan/indikator kinerja pembangunan daerah	Tahun					Standar	Interpretasi
		2011	2012	2013	2014	2015*)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penduduk							
1.25.3	Jumlah surat kabar Nasional /lokal	15	15	16	16	12		
1.25.4	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	8	5	5	5	5		
1.25.5	Webside milik pemerintah daerah	1	1	1	1	1		
1.25.6	Pameran/Expo	1	2	2	2	2		
1.26	Urusan Perpustakaan							
1.26.1	Rasio jumlah pengunjung perpustakaan	100	100	100	100	100		
1.26.2	jumlah tenaga perpustakaan	10	8	10	6	6		
1.26.3	Jumlah Desa dan kelurahan yang cerdas	51	51	51	51	51		
2.	Layanan Urusan Pilihan							
2.1	Urusan Pertanian							
2.1.1	Kontribusi sektor ekonomi/lapangan usaha Peternakan terhadap PDRB (%)	19,02	19,65	20,76	20,88	-		
2.1.2	Produktivitas Padi Kw/Ha	5,833	6,558	6,095	6,845	13,42		
2.1.3	Produktivitas Sayuran Ton/Ha)	44	44	11,10	53,37	53,37		
2.1.4	Produktifitas Kelapa Dalam Kg/Ha	1.160	1.170	1.150	1.180	1.010		
2.1.5	Produktifitas Kopi Robusta Kg/Ha	270	290	260	280	290		
2.1.6	Produktifitas Cengkeh Kg/Ha	20	390	240	240	230		
2.1.7	Produktifitas Kakao Kg/Ha	430	430	630	670	640		
2.1.8	Produktifitas Panili Kg/Ha	280	300	40	20	0.5		
2.2	Urusan Kehutanan							
2.2.1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (%)	44,53%	47,85%	63.88%	68,18%	71.82%		
2.2.2	Kerusakan kawasan hutan(%)	26,63%	26,63%	26,15%	25,42%	24.94%		
2.2.3	Kawasan Hutan Tetap dikelola oleh Institusi permanen pada Tingkat Tapak (%t)	0	0	0	0	0		
2.3	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral							
2.3.1	% Pertambangan tanpa izin/ Liar	-	-	-	-	-		
2.3.2	% Kontribusi lapangan usaha pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	1,01%	1,06%	1,075	1,02%	0		
2.4	Urusan Pariwisata							
2.4.1	Kunjungan wisata	89.474	98,859	134.093	132.170	-		
2.4.2	Kontribusi sektor ekonomi/lapangan usaha pariwisata	0,012	0,012	-	-	-		



No	Aspek /focus/urutan/indikator kinerja pembangunan daerah	Tahun					Standar	Interpretasi
		2011	2012	2013	2014	2015*)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	terhadap PDRB							
2.5	Urusan Kelautan dan Perikanan							
2.5.1	Jumlah produksi ikan	54.24%	55.65%	31.17%	49.44%	42.07%		
2.5.2	% Capaian target	84.78	96.28	90.08	92.10	92.89		
2.5.3	Jumlah rata-rata konsumsi ikan	15,00%	20,00%	25,00%	30,00%	35.00%		
2.6	Urusan Perdagangan							
2.6.1	% Kontribusi sektor ekonomi/lapangan usaha Perdagangan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang terhadap PDRB	0,11	0,10	0,10	0,09	-		
2.6.2	Ekspor Bersih Perdagangan	144.229.332.100	1.018.974.000,46	217.166.690.075	1.422.888.965,094	361.128.670.065		
2.7	Urusan Perindustrian							
2.7.1	% Kontribusi sektor ekonomi/lapangan usaha Industri pengolahan terhadap PDRB	4,94%	4,89%	4,90%	4,91%	-		
2.7.2	Pertumbuhan Industri secara keseluruhan	3,30%	1.03%	0.45%	(73.02)%	2.04%		
2.8	Transmigrasi							
2.8.1	Transmigrasi swakarsa	0	0	24	0	0		
2.8.2	Kontribusi sektor ekonomi/lapangan usaha transmigrasi terhadap PDRB	0	0	0	0	0		
C	Aspek Daya Saing Daerah							
1	Angka konsumsi RT (Rumah Tangga) per kapita	-	-	-	-	-		
2	Perbandingan faktor produksi dengan produk yang menggambarkan nilai tukar petani	-	-	-	-	-		
3	Persentase konsumsi RT non pangan	-	-	-	-	-		
D	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur							
1	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	1,15	1,09	1,02	0,97	0,96		
2	Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum	2,25	1,76	1,75	1,55	1,17		
3	Jumlah Org/ Barang Melalui Dermaga/ Bandara/ Terminal per Tahun	1,47	1,54	1,76	1,82	1,46		
E	Fokus Iklim Berinvestasi							
1	Angka kriminalitas,	-	-	-	-	-		
2	jumlah demo	-	-	-	-	-		
3	Lama Proses Perijinan, dan	14	14	14	14	14		



No	Aspek /focus/ururan/indicators kinerja pembangunan daerah	Tahun					Standar	Interpretasi
		2011	2012	2013	2014	2015*)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Persentase desa berstatus swasembada	-	-	-	-	-		
F	Fokus Sumber Daya Manusia							
1	Rasio Ketergantungan	100	100	100	45.09	45.07		
2	Rasio lulusan S-1, S-2 dan S-3 terhadap total penduduk	3.28	3.33	3.38	3.34	2.77		

Sumber: Seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Jemberana.